

**PENGARUH BELANJA PEMERINTAH DAN
PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP
TAX RATIO INDONESIA**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Dalam Bidang Ekonomi Syariah*

Oleh

**NURHANIPAH
NIM. 22 402 00143**

**PRODI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2026**

**PENGARUH BELANJA PEMERINTAH DAN
PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP
TAX RATIO INDONESIA**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Dalam Bidang Ekonomi Syariah*

Oleh

**NURHANIPAH
NIM. 22 402 00143**

**PRODI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2026**

**PENGARUH BELANJA PEMERINTAH DAN
PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP
TAX RATIO INDONESIA**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Dalam Bidang Ekonomi Syariah*

Oleh

**NURHANIPAH
NIM. 22 402 00143**

Pembimbing I



H. Aswadi Lubis, S.E. M.Si.
NIP. 19630107 199903 1002

Pembimbing II



Hammi Fadlilah Nasution, M.Pd
NIP19830317 201801 2 001

PRODI EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2026

Hal : Lampiran Skripsi
An. Nurhanipah

Padangsidempuan, 18 Juni 2026

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
UIN SYAHADA Padangsidempuan
di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi an. Nurhanipah yang berjudul "Pengaruh Belanja Pemerintah Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap *Tax Ratio* Indonesia", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini. Demikian kami sampaikan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing I



H. Aswadi Lubis, S.E. M.Si.
NIP. 19630107 199903 1002

Pembimbing II



Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd
NIP19830317 201801 2 001

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurhanipah

NIM : 22 402 00143

Fakultas/ Prodi : Ekonomi Dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Pengaruh Belanja Pemerintah Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap *Tax Ratio* Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2023.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 3 tahun 2023 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 18 Juni 2026
Saya yang Menyatakan

A handwritten signature in black ink is written over a red and yellow revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '1000', 'METERAI TEMPEL', and the serial number '392AOX003022344'.

Nurhanipah
NIM. 22 402 00143

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nurhanipah
NIM : 22 402 00143
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-Exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul: Pengaruh Belanja Pemerintah Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap *Tax Ratio* Indonesia ".

Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (data base), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hakapta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan
Pada tanggal : 18 Juni 2026
Yang menyatakan,



Nurhanipah
NIM. 22 402 00143



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. T. Rizal Nurdin KM. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telepon. (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Nurhanipah
NIM : 22 402 00143
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Pengaruh Belanja Pemerintah Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap *Tax Ratio* Indonesia

Ketua

Dr. Delima Sari Lubis, M.A
NIDN. 2012058401

Sekretaris

Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd
NIDN. 2017038301

Anggota

Dr. Delima Sari Lubis, M.A
NIDN. 2012058401

Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd
NIDN. 2017038301

Dr. Nurul Izzah, M.Si
NIDN. 2022019001

Assa'adatul Khairiyah, M.Ak
NIDN. 2017029303

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Kamis/18 Juni 2026
Pukul : 08.30 s.d. 10.30 WIB
Hasil/Nilai : Lulus/83,25 (A)
Indeks Predikat Kumulatif : 3,46
Predikat : Sangat Memuaskan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

Nomor: *2314* /Un.28/G/G.4a/PP.9/06/2026

JUDUL SKRIPSI : Pengaruh Belanja Pemerintah Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap
Tax Ratio Indonesia
NAMA : Nurhanipah
NIM : 22 402 00143

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ekonomi Syariah

Padangsidimpuan, 29 Juni 2026
Dekan,



Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

NAMA : Nurhanipah
NIM : 22 402 00143
Judul Skripsi : **Pengaruh Belanja Pemerintah Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap *Tax Ratio* Indonesia**

Tax ratio merupakan indikator penting dalam mengukur kapasitas fiskal dan efektivitas sistem perpajakan suatu negara. *Tax ratio* di Indonesia berada di bawah rata rata negara ASEAN bahkan menjadi salah satu yang paling terendah, meskipun memiliki ukuran ekonomi terbesar di kawasan ASEAN. Pada tahun 2020, 2024, dan 2025 belanja pemerintah mengalami peningkatan namun *tax ratio* mengalami penurunan. Pada tahun 2021 dan 2022 belanja pemerintah mengalami penurunan namun *tax ratio* justru mengalami peningkatan, dan pada tahun 2025 pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan namun *tax ratio* mengalami penurunan. Masalah tersebut tidak sesuai dengan teori *keynesian* dan teori *tax bouyancy* dan *tax elasticity*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja pemerintah dan pertumbuhan ekonomi terhadap *tax ratio* Indonesia, baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data penelitian ini adalah sekunder *time series* periode 1991–2025. Populasi penelitian terdiri atas seluruh data tahunan *tax ratio*, belanja pemerintah, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sampel penelitian berjumlah 35 observasi yang mencakup data periode 1991–2025. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sampel jenuh. Analisis dilakukan menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan software EViews melalui uji asumsi klasik, uji koefisien determinasi, uji t, dan uji F. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja pemerintah berpengaruh terhadap *tax ratio* di Indonesia, pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap *tax ratio* di Indonesia, belanja pemerintah dan pertumbuhan ekonomi secara simultan berpengaruh terhadap *tax ratio* di Indonesia. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi lebih mampu memperluas basis pajak dibandingkan peningkatan belanja pemerintah. Dalam perspektif *maqashid syariah*, optimalisasi penerimaan pajak dan pengelolaan belanja negara yang produktif merupakan instrumen penting dalam mewujudkan kemaslahatan, keadilan distribusi, dan keberlanjutan fiskal. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan efektivitas belanja pemerintah serta penguatan kebijakan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi guna meningkatkan *tax ratio* Indonesia secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Belanja Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi, *Tax Ratio*.

ABSTRACT

NAME : Nurhanipah
Reg. Number : 22 402 00143
THESIS TITTLE : *The Effect of Government Spending and Economic Growth on Indonesia's Tax Ratio,*

The tax ratio is an important indicator in measuring the fiscal capacity and effectiveness of a country's tax system. Indonesia's tax ratio is below the ASEAN average and is even one of the lowest, despite having the largest economy in the region. In 2020, 2024, and 2025, government spending increased, but the tax ratio decreased. In 2021 and 2022, government spending decreased, but the tax ratio increased. In 2025, economic growth increased, but the tax ratio decreased. This problem is inconsistent with Keynesian theory, tax bouyancy, and tax elasticity. This study aims to analyze the effect of government spending and economic growth on Indonesia's tax ratio, both partially and simultaneously. This study uses a quantitative approach. The data for this study are secondary time series for the period 1991–2025. The study population consists of all annual data on the tax ratio, government spending, and economic growth in Indonesia. The study sample consists of 35 observations covering the period 1991–2025. The sampling technique used is saturated sampling. The analysis was conducted using multiple linear regression with the help of EViews software through the classical assumption test, coefficient of determination test, t-test, and F-test. The results of the study indicate that government spending affects the tax ratio in Indonesia, economic growth does not affect the tax ratio in Indonesia, government spending and economic growth simultaneously affect the tax ratio in Indonesia. This finding indicates that increasing economic activity is more capable of expanding the tax base than increasing government spending. In the perspective of maqashid shariah, optimizing tax revenue and managing productive state spending are important instruments in realizing welfare, distribution justice, and fiscal sustainability. This study recommends increasing the effectiveness of government spending and strengthening policies that can encourage economic growth in order to increase Indonesia's tax ratio sustainably.

Keywords: Government Spending, Economic Growth, Tax Ratio.

ملخص البحث

الاسم : نور هانيبا
لرقم الجامعي : ٢٢٤٠٢٠٠١٤٣
عنوان الرسالة : أثر الإنفاق الحكومي والنمو الاقتصادي على نسبة الضرائب في
إندونيسيا

تُعدّ نسبة الضرائب مؤشراً هاماً لقياس القدرة المالية وفعالية النظام الضريبي لأي دولة. وتقلّ نسبة الضرائب في إندونيسيا عن متوسط دول الآسيان، بل وتُصنّف ضمن أدنى النسب، على الرغم من كونها صاحبة أكبر اقتصاد في المنطقة. ففي الأعوام 2020 و2024 و2025، ازداد الإنفاق الحكومي، بينما انخفضت نسبة الضرائب. وفي عامي 2021 و2022، انخفض الإنفاق الحكومي، بينما ارتفعت نسبة الضرائب. وفي عام 2025، ازداد النمو الاقتصادي، بينما انخفضت نسبة الضرائب. وتتعارض هذه الظاهرة مع النظرية الكينزية، ومفهوم مرونة الضرائب، وديناميكية الطلب الضريبي. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أثر الإنفاق الحكومي والنمو الاقتصادي على نسبة الضرائب في إندونيسيا، سواءً بشكل جزئي أو متزامن. وتستخدم الدراسة منهجاً كمياً، وتعتمد على بيانات سلاسل زمنية ثنائية للفترة 1991-2025. ويشمل مجتمع الدراسة جميع البيانات السنوية المتعلقة بنسبة الضرائب، والإنفاق الحكومي، والنمو الاقتصادي في إندونيسيا. تتكون عينة الدراسة من 35 مشاهدة تغطي الفترة من 1991 إلى 2025. وقد استُخدمت تقنية أخذ العينات المشبعة. أُجري التحليل باستخدام الانحدار الخطي المتعدد بمساعدة برنامج EViews من خلال اختبار الافتراضات الكلاسيكية، واختبار معامل التحديد، واختبار t ، واختبار F . تشير نتائج الدراسة إلى أن الإنفاق الحكومي يؤثر على نسبة الضرائب في إندونيسيا، وأن النمو الاقتصادي لا يؤثر عليها، وأن الإنفاق الحكومي والنمو الاقتصادي معاً يؤثران على نسبة الضرائب. تشير هذه النتيجة إلى أن زيادة النشاط الاقتصادي أكثر قدرة على توسيع القاعدة الضريبية من زيادة الإنفاق الحكومي. من منظور مقاصد الشريعة، يُعدّ ترشيد الإيرادات الضريبية وإدارة الإنفاق الحكومي الإنتاجي أداتين مهمتين لتحقيق الرفاه، والعدالة في التوزيع، والاستدامة المالية. توصي هذه الدراسة بزيادة فعالية الإنفاق الحكومي وتعزيز السياسات التي تشجع النمو الاقتصادي من أجل زيادة نسبة الضرائب في إندونيسيا بشكل مستدام.

الكلمات المفتاحية: نسبة الضرائب، الإنفاق الحكومي، النمو الاقتصادي.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur peneliti ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya yang tiada henti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut di contoh dan diteladani, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul “Pengaruh Belanja Pemerintah Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap *Tax ratio* Indonesia”. Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Program Studi Ekonomi Syariah di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Sumper Mulia Harahap, M.Ag, Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Bapak Prof. Dr. H. Arbarur Rasyid, M.A., Wakil Rektor Bidang Akademik dan x Pengembangan Lembaga, Prof. Dr. Darwis Harahap, S. H. I. M. Si, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, dan Dr. Ikhawauddin Harahap, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Ibu Delima Sari Lubis, M.A., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dr. Sarmiana Batubara, M.A., selaku Wakil Dekan II Bidang Admministrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Purnama Hidayah Harahap, M.H., Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
3. Ibu Ibu Sry Lestari, M.E.I, selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
4. Bapak H. Aswadi Lubis, S.E. M.Si.. selaku pembimbing I, dan Ibu Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd., selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Kepala Perpustakaan Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., S.S., M.Hum serta Pegawai Perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak serta Ibu dosen UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
7. Teristimewa, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta, Ayah Santi Aji Aritonang dan Ibu Hotna Sari Hasibuan, dua sosok yang paling berjasa dalam kehidupan penulis. Meskipun Ayah dan Ibu tidak berkesempatan menempuh pendidikan hingga bangku perkuliahan, keduanya selalu mengupayakan agar anak-anaknya dapat menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Dengan segala keterbatasan yang ada, Ayah dan Ibu selalu menjadi sumber kekuatan, penguat langkah, dan tempat kembali bagi penulis dalam setiap proses yang dijalani. Sebagai anak kelima, penulis bersyukur dan bangga dapat menyelesaikan pendidikan sarjana sebagai lulusan pertama di keluarga. Setiap cucuran keringat, kerja keras, dan tanggung jawab Ayah dalam menafkahi keluarga menjadi jalan bagi penulis untuk dapat mengenyam pendidikan hingga tahap ini, sekaligus menjadi teladan tentang arti keteguhan dan tanggung jawab. Ibu senantiasa menghadirkan doa, motivasi, nasihat, dan kasih sayang tanpa batas yang terus mengiringi setiap langkah dan ikhtiar penulis, dengan kesabaran dan pengorbanan yang tak pernah terhitung. Seluruh dukungan, perhatian, serta

keikhlasan Ayah dan Ibu menjadi sumber kekuatan, inspirasi, serta pelita yang senantiasa menerangi perjalanan penulis dalam menyelesaikan pendidikan sarjana ini. Penulis berharap Ayah dan Ibu senantiasa diberikan kesehatan, umur yang panjang, serta kebahagiaan, sehingga dapat terus mendampingi setiap langkah penulis hingga meraih kesuksesan dan memberikan kebahagiaan serta kebanggaan atas segala pengorbanan yang telah diberikan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, umur yang panjang, serta membalas seluruh kebaikan, pengorbanan, dan keikhlasan Ayah dan Ibu dengan pahala yang berlipat ganda.

8. Kepada keempat abang tercinta, yaitu Anwar Husein Aritonang, Ahmad Ridhoan Aritonang, Rizki Effendi Aritonang, dan Kari Gunawan Aritonang, serta adik-adik tersayang, Afrina Ulfa Aritonang dan Rovikoh Yunita Sari Aritonang, penulis mengucapkan terima kasih atas doa dan dukungan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan hingga menyelesaikan pendidikan ini. Sebagai saudara, kalian memiliki tempat yang istimewa dalam kehidupan penulis. Meskipun tidak semua hal dapat selalu diungkapkan atau dilalui bersama, penulis berharap tali persaudaraan dan kebersamaan di antara kita senantiasa terjaga dengan baik. Terima kasih karena telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis hingga berada di titik ini.
9. Kepada sahabat tercinta, yaitu Aira penulis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan yang telah diberikan selama masa perkuliahan hingga proses penyelesaian skripsi ini. Terima kasih telah menjadi teman yang selalu

memberikan semangat dan menemani penulis dalam berbagai proses dan tantangan selama menempuh pendidikan.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang jauh lebih baik atas amal kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti. Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas karunian-nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri peneliti. Peneliti juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Padangsidempuan, 18 Juni 2026



Nurhanipah
NIM. 22 402 200143

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini Sebagian dilambangkan dengan huruf, Sebagian dengan tanda dan Sebagian lain dilambangkan dengan Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak di lambangkan	Tidak di lambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	s (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti vocal Bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap Bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
اِيْ. َ	Fathah dan ya	Ai	a dan i
وِ. َ	Fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vocal Panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, traskiterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِيْ. َ. ا	Fathah dan alif atau Ya	A	a dan garis atas
يِ. ِ	Kasrah dan ya	I	i dan garis di bawah
وِ. ُ	Dommah dan wau	U	u dan garis di atas

C. Ta Marbutah

Transliterasinya untuk Ta Marbutah ada dua

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dummah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ٓ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan didepan daftar transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau

penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
BERITA ACARA MUNAQASYAH	
LEMBAR PENGESAHAN DEKAN/DIREKTUR UIN SYAHADA	
PADANGSIDIMPUAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Definisi Operasional Variabel.....	10
E. Batasan Masalah	11
F. Tujuan Penelitian.....	12
G. Manfaat Penelitian.....	12
H. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II LANDASAN TEORI	15
A. Kerangka Teori	15
1. Maqashid Syariah	15
2. Teori Keynesian.....	18
3. <i>Tax buoyancy</i> dan <i>Tax Elasticity</i>	19
4. <i>Tax Ratio</i>	20
a. Pengertian <i>Tax ratio</i>	20
b. <i>Tax ratio</i> Dalam Perspektif Islam.....	21
c. Tujuan <i>Tax ratio</i>	23
d. Manfaat <i>Tax ratio</i>	24
e. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi <i>Tax ratio</i>	25
f. Indikator <i>Tax ratio</i>	26
5. Belanja Pemerintah	27
a. Pengertian Belanja Pemerintah.....	27
b. Belanja Pemerintah Dalam Perspektif Islam	28
c. Tujuan Belanja Pemerintah	30
d. Manfaat Belanja Pemerintah	31
e. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Pemerintah	32
f. Indikator Belanja Pemerintah	33
6. Pertumbuhan Ekonomi	34
a. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi	34

b. Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam	35
c. Tujuan Pertumbuhan Ekonomi	38
d. Manfaat Pertumbuhan Ekonomi	38
e. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pertumbuhan Ekonomi	39
f. Indikator Pertumbuhan Ekonomi	40
B. Kajian Penelitian Terdahulu	41
C. Kerangka Berpikir	51
D. Hipotesis	52
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN	 54
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	54
B. Jenis Penelitian	54
C. Populasi Dan Sampel	54
1. Populasi	54
2. Sampel	55
D. Teknik Pengumpulan Data	55
E. Teknik Analisis Data	57
1. Analisis Statistik Deskriptif	58
2. Uji Normalitas	59
3. Uji Multikolinearitas	59
4. Uji Autokorelasi	60
5. Analisis Regresi Linier Berganda	60
6. Uji Hipotesis	62
a. Uji t (Parsial)	62
b. Uji F (Simultan)	62
c. Koefisien Determinasi (R-Square)	63
 BAB IV HASIL PENELITIAN	 64
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	64
B. Deskripsi Data Penelitian	68
1. <i>Tax ratio</i>	68
2. Belanja Pemerintah	72
3. Pertumbuhan Ekonomi	75
C. Hasil Analisis Data	79
1. Hasil Uji Statistik Deskriptif	79
a. <i>Tax ratio</i> (Y)	79
b. Belanja Pemerintah (X1)	80
c. Pertumbuhan Ekonomi (X2)	81
2. Hasil Uji Normalitas	82
3. Hasil Uji Multikolinieritas	82
4. Hasil Uji Autokorelasi	83
5. Hasil Uji Regresi Linier Berganda	84
6. Hasil Uji Hipotesis	85
a. Uji t (Parsial)	85
b. Uji F (Simultan)	86
c. Uji Koefisien Determinasi (R2)	87
D. Pembahasan	88

1. Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap <i>Tax Ratio</i> Indonesia	88
2. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap <i>Tax Ratio</i> Indonesia.....	90
3. Belanja Pemerintah Dan Pertumbuhan Ekonomi Secara Simultan Berpengaruh Signifikan Terhadap <i>Tax Ratio</i>	94
E. Keterbatasan Penelitian	96
 BAB V PENUTUP	 98
A. Kesimpulan	98
B. Implikasi	99
C. Saran	100
 DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Tabulasi Data <i>Tax ratio</i> , PDB Dan Pertumbuhan Ekonomi.....	6
Tabel I. 2 Definisi Operasional Variabel	10
Tabel II. 1 Penelitian Terdahulu.....	41
Tabel IV. 1 Perkembangan <i>Tax ratio</i> Indonesia 1991-2015.....	68
Tabel IV. 2 Perkembangan Belanja Pemerintah Indonesia Tahun 1991–2025 ...	73
Tabel IV. 3 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 1991-2025.....	76
Tabel IV. 4 Uji Statistik Deskriptif	79
Tabel IV. 5 Hasil Uji Multikolinieritas	83
Tabel IV. 6 Hasil Uji Autokorelasi	83
Tabel IV. 7 Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	84
Tabel IV. 8 Hasil Uji t (Uji Parsial)	85
Tabel IV. 9 Hasil Uji F (Uji Simultan)	86
Tabel IV. 10 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 Kerangka Pikir	52
Gambar IV. 1 Hasil Uji Normalitas	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendapatan nasional merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur kinerja perekonomian suatu negara. Dalam konteks fiskal, pendapatan memiliki hubungan yang erat dengan *tax ratio* karena *tax ratio* dihitung sebagai perbandingan antara penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB), yang pada dasarnya mencerminkan total pendapatan nasional. Semakin besar pendapatan nasional, maka potensi penerimaan pajak juga akan meningkat, sehingga secara teoritis *tax ratio* akan meningkat seiring dengan pertumbuhan pendapatan tersebut.¹

Dalam perspektif ekonomi publik, peningkatan pendapatan masyarakat akan meningkatkan kemampuan membayar pajak (*ability to pay*). Ketika pendapatan individu dan perusahaan meningkat, maka konsumsi, investasi, dan aktivitas ekonomi lainnya juga akan meningkat, yang pada akhirnya memperluas basis pajak. Dengan demikian, peningkatan pendapatan memiliki hubungan positif terhadap penerimaan pajak dan *tax ratio*, terutama dalam sistem perpajakan yang efektif dan memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi.² Hubungan antara pendapatan dan *tax ratio* sangat tergantung pada kemampuan sistem perpajakan dalam merespons pertumbuhan ekonomi. Jika penerimaan pajak meningkat lebih cepat dibandingkan pertumbuhan pendapatan nasional, maka *tax ratio* akan meningkat. Sebaliknya, jika

¹ N. Gregory Mankiw, *Principles Of Economics* (CENGAGE, 2021). Hlm. 82.

² Richard Bird et al., *Tax Buoyancy and Tax Elasticity* (New York: McGraw-Hill, 2023). Hlm. 48.

pertumbuhan pendapatan tidak diikuti oleh peningkatan penerimaan pajak yang signifikan, maka *tax ratio* akan cenderung stagnan atau bahkan menurun. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas kebijakan fiskal dan administrasi perpajakan menjadi faktor penting dalam menentukan hubungan antara pendapatan dan *tax ratio*.³

Rasio pajak (*tax ratio*) merupakan indikator fundamental dalam menilai kapasitas fiskal suatu negara untuk membiayai pembangunan berkelanjutan. Sebagai tulang punggung penerimaan negara, pajak tidak hanya berfungsi sebagai alat *budgetair* (pengumpul dana), tetapi juga sebagai instrumen *regulerend* untuk menjaga stabilitas ekonomi makro. Namun, dalam masalah ekonomi publik, tren *tax ratio* sering kali menjadi permasalahan mendasar, di satu sisi negara membutuhkan dana besar untuk pemulihan ekonomi, namun di sisi lain, pembayaran pajak sering diabaikan dan banyak dilakukan penghindaran pajak oleh wajib pajak itu sendiri.⁴ Fenomena ini menuntut pemerintah untuk tidak hanya melihat pajak dari sisi tarif, tetapi juga dari efektivitas sistem administrasi perpajakan dan aspek pengungkapan pajak secara sukarela. Peningkatan rasio pajak yang berkaitan erat dengan penerimaan pajak menjadi semakin krusial ketika dikaitkan dengan kemampuan negara menjaga kemandirian anggaran dan mengurangi

³ Richard M Bird and Eric M Zolt, "Redistribution via Taxation: The Limited Role of the Personal Income Tax in Developing Countries," *World Development* 66, 2015, 625–39. Hlm. 635.

⁴ John D Smith, *Global Taxation Challenges in the Post-Pandemic Era* (New York: Academic Press, 2023). Hlm. 41.

ketergantungan pada utang luar negeri.⁵ Secara regional, negara-negara ASEAN menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan dalam *tax ratio*, misalnya dalam penelitian oleh Annisa Shela Septiani yang mengkaji *tax ratio* negara-negara di ASEAN periode 2015-2021 menyebut bahwa secara rata-rata *tax ratio* ASEAN berada di kisaran menengah sekitar 14%-15% kecuali Indonesia.⁶

Dalam lima tahun terakhir, perkembangan *tax ratio* Indonesia menunjukkan pola yang fluktuatif tetapi cenderung stagnan di kisaran 10% dari PDB, pada tahun 2019, *tax ratio* Indonesia tercatat sebesar 9,76%, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 8,33% disebabkan oleh pandemi COVID-19. Pada periode berikutnya, *tax ratio* mulai mengalami pemulihan, yaitu sebesar 9,11% pada tahun 2021 dan meningkat menjadi 10,41% pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2023 *tax ratio* kembali mengalami sedikit penurunan menjadi 10,31%, dan terus menurun hingga mencapai sekitar 10,08% pada tahun 2024 serta 9,31% pada tahun 2025.⁷

Tren ini menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto belum stabil dan cenderung fluktuatif, bahkan kembali menurun meskipun kondisi ekonomi telah pulih.⁸ Kebijakan fiskal menekankan bahwa meskipun penerimaan pajak secara nominal meningkat

⁵ Rina S Dewi, "Analisis Kemandirian Fiskal Dan Utang Luar Negeri Indonesia," *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 12, no. 2, 2022, 110–25. Hlm. 112.

⁶ Annisa Shela Septiani, "Effect of Per capita Income, Economic Growth Rate and Tax Rate on Tax Ratios in ASEAN Countries Period 2015-2021," *OIKOS: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi* 8, no. 1, 2023, 122–35. Hlm. 133.

⁷ World Bank et al., "Tax Ratio 2025 Hanya Sebesar 9,31% Dari PDB," 2024.

⁸ Angka PDB Nominal 2023 Dirilis, *Tax ratio* Capai 10,31 Persen, accessed 2 April, 2026, <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1800366/angka-pdb-nominal-2023-dirilis-tax-ratio-capai-1031-persen>.

didukung pemulihan konsumsi rumah tangga, aktivitas ekspor, dan harga komoditas kontribusinya terhadap PDB cenderung datar sehingga puncak *tax ratio* Indonesia dalam satu dekade terakhir hanya menyentuh sekitar 11,4% dan belum mampu mencapai 15% yang sering disebut sebagai batas minimum untuk ruang fiskal yang memadai. Hal ini menegaskan bahwa persoalan utama Indonesia bukan sekadar pertumbuhan penerimaan pajak dalam rupiah, tetapi kemampuan menaikkan rasio pajak terhadap PDB secara berkelanjutan.

Faktor- faktor yang memengaruhi *tax ratio* adalah belanja pemerintah, pertumbuhan ekonomi dan kepatuhan pajak.⁹ Belanja pemerintah (*government spending*) menjadi salah satu pendorong penting aktivitas ekonomi melalui belanja negara untuk barang/jasa, investasi infrastruktur, subsidi, dan lainnya yang pada gilirannya dapat mempengaruhi basis pajak dan penerimaan pajak. Menurut hipotesis *spend-tax* (belanja menghasilkan pajak) meningkatnya belanja pemerintah akan mendorong penerimaan pajak melalui peningkatan aktivitas ekonomi dan basis pajak. Studi di Indonesia oleh Adji & Ghuzini menemukan bahwa belanja pemerintah merupakan variabel yang signifikan terhadap penerimaan pajak dan komponennya.¹⁰

Belanja pemerintah yang makin besar dapat memperkuat kapasitas fiskal pemerintah yang berasal dari pajak jika digunakan secara efektif dan meningkatkan aktivitas ekonomi secara luas. Namun, belanja yang tidak

⁹ Waluyo, *Perpajakan Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2022). Hlm. 20.

¹⁰ A Adji and D Ghuzini, "Leading Indicators of Tax Revenue: Does Government Spending Matter?," *Journal of Applied Accounting and Taxation* 9, no. 2, 2024, 84–96. Hlm. 88.

produktif atau dibayangi oleh inefisiensi dapat pula melemahkan peningkatan *tax ratio*. Kenyataannya di Indonesia saat ini belanja pemerintah dianggap masih kurang efektif sehingga perlu dilakukan evaluasi secara mendalam, mengingat ketergantungan pada penerimaan pajak bukanlah fondasi yang kokoh bagi keberlanjutan fiskal. Pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal, prioritas pembangunan, penerimaan negara dan stabilitas ekonomi dari sisi makro ekonomi seperti inflasi, suku bunga, dan nilai tukar merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat belanja pemerintah.¹¹

Perkembangan belanja pemerintah menunjukkan kecenderungan yang sejalan dengan teori fiskal Keynesian. Berdasarkan teori Keynesian, peningkatan belanja pemerintah seharusnya mampu mendorong aktivitas ekonomi, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan pada akhirnya memperluas basis pajak.

Pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) juga memainkan peran krusial dalam penerimaan pajak. Ketika ekonomi tumbuh, maka ukuran basis ekonomi yang terkena pajak ikut membesar (PDB naik), potensi pendapatan pajak meningkat, dan kepatuhan pajak cenderung lebih baik.¹² Fenomena ini dijelaskan dalam literatur sebagai *tax buoyancy* dan *tax elasticity* bahwa penerimaan pajak harus tumbuh lebih cepat dari PDB agar *tax ratio* naik.¹³

Dalam konteks Indonesia, implikasi dari penelitian oleh Maryantika &

¹¹ International Monetary Fund et al., *The General Theory of Employment, Interest and Money* (New York: Macmillan, 2023). Hlm. 245.

¹² D D Maryantika, "Determinants of Tax Revenue in Indonesia with Economic Growth and Government Spending," *JPPi* 8, no. 2, 2022, 450–65. Hlm. 452.

¹³ Pino Siddharta, "Memahami Hubungan Antara Tax Buoyancy Dan Tax Ratio Di Indonesia," *IKPI (Ikatan Konsultan Pajak Indonesia)*, 2025.

Wijaya menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi secara positif mempengaruhi penerimaan pajak melalui mekanisme mediasi belanja pemerintah dan pembangunan manusia.¹⁴ Pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan pemulihan yang cukup baik pasca pandemi. Setelah mengalami kontraksi pada tahun 2020, ekonomi Indonesia tumbuh positif pada tahun 2021 dan stabil di kisaran 5% hingga tahun 2025. Pertumbuhan ekonomi yang stabil seharusnya didukung oleh kebijakan pemerintah, termasuk belanja negara yang produktif, sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan memperluas basis perpajakan. Dengan demikian, secara teoritis pertumbuhan ekonomi yang stabil seharusnya diikuti oleh peningkatan *tax ratio*. Data *tax ratio*, PDB dan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I. 1
Tabulasi Data *Tax ratio*, PDB Dan Pertumbuhan Ekonomi

Tahun	<i>Tax ratio</i> (%)	Belanja Pemerintah (%)	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2019	9,76	16,4	5,02
2020	8,33	18,6	-2,07
2021	9,11	16,7	3,69
2022	10,41	15,7	5,31
2023	10,31	14,9	5,05
2024	10,08	15,0	5,03
2025	9,31	15,2	5,11

Sumber: Diolah peneliti dari berbagai sumber.

Pada Tabel I.1, terlihat beberapa fenomena penting pada hubungan antara belanja pemerintah, pertumbuhan ekonomi, dan *tax ratio* di Indonesia. Pada tahun 2020, belanja pemerintah meningkat sebesar 2,2% namun *tax ratio* justru turun 1,43%. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan

¹⁴ D D Maryantika, "Determinants of Tax Revenue in Indonesia with Economic Growth and Government Spending," *JPPi* 8, no. 2, 2022, 450–65. Hlm. 456.

belanja tidak diikuti oleh peningkatan penerimaan pajak karena aktivitas ekonomi melemah. Fenomena serupa juga terjadi pada tahun 2024 dan 2025. Belanja pemerintah meningkat 0,1% pada 2024 dan kembali naik 0,2% pada 2025, tetapi *tax ratio* justru menurun 0,23% pada 2024 dan turun 0,77% pada 2025. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan belanja pemerintah tidak selalu berdampak langsung terhadap peningkatan penerimaan pajak.

Sebaliknya, pada tahun 2021 dan 2022 terjadi kondisi yang berbeda, di mana belanja pemerintah menurun 1,9% pada tahun 2021 dan kembali turun 1% pada tahun 2022, namun *tax ratio* justru meningkat 0,78% pada tahun 2021 dan naik 1,3% pada tahun 2022. Peningkatan ini terjadi bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi yang membaik dari -2,07% pada tahun 2020 menjadi 3,69% pada tahun 2021 dan meningkat lagi menjadi 5,31% pada tahun 2022, yang menunjukkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi dan basis pajak.

Pada tahun 2025 terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi meningkat 0,08%, namun *tax ratio* justru menurun sebesar 0,77%. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti oleh peningkatan penerimaan pajak. Penurunan *tax ratio* di tengah pertumbuhan ekonomi yang meningkat mengindikasikan bahwa peningkatan output ekonomi belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan penerimaan pajak secara proporsional. Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara belanja pemerintah, pertumbuhan ekonomi, dan *tax ratio*

bersifat fluktuatif dan tidak selalu bergerak searah dalam setiap periode. Hasil pada tabel menunjukkan adanya kesenjangan antara teori dan realitas.

Terdapat kesenjangan (*gap research*) dari studi-studi terdahulu dalam tiga tahun terakhir. Penelitian yang dilakukan oleh Saputra dan Hidayat menemukan bahwa belanja pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak karena efek stimulus infrastruktur.¹⁵ Sebaliknya, studi dari Wijaya dan Kusuma justru menemukan tidak berpengaruh, bahwa belanja pemerintah yang berlebihan memicu defisit yang pada akhirnya membebani struktur pajak masa depan.¹⁶ Pada variabel pertumbuhan ekonomi, penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati menyimpulkan adanya pengaruh antara pertumbuhan ekonomi dan *tax ratio*.¹⁷ Namun, temuan berbeda oleh Pratama dkk. yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap rasio pajak di negara berkembang.¹⁸ Inkonsistensi hasil dari penelitian-penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antar variabel tersebut belum jelas masih bergantung pada konteks-konteks lainnya.

Secara normatif, UU Keuangan Negara dan berbagai rencana pembangunan jangka menengah menargetkan *tax ratio* Indonesia dapat mencapai level 15% untuk menjamin keberlangsungan fiskal. Harapannya,

¹⁵ Andi Saputra and Rahmat Hidayat, "Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Penerimaan Pajak Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 13, no. 2, 2022, 89–102. Hlm. 99.

¹⁶ Citra Wijaya and Dian Kusuma, "The Negative Impact of Excessive Government Spending on Future Tax Revenue," *Journal of Fiscal Studies* 5, no. 1, 2023, 45–58. Hlm. 48.

¹⁷ Eka Rahmawati, "Economic Growth and Tax Revenue: Evidence from Indonesia," *Asian Journal of Economics* 7, no. 4, 2021, 112–25. Hlm. 115.

¹⁸ Dimas Pratama, L Susanti, and B Hartono, "Informal Sector and the Failure of Tax Collection in Developing Countries," *International Journal of Development Issues* 10, no. 2, 2022, 156–70. Hlm. 160.

setiap kenaikan 1% pertumbuhan ekonomi dan setiap rupiah belanja pemerintah dapat mendorong penerimaan negara secara optimal,¹⁹ namun kenyataannya, realisasi *tax ratio* masih tertahan di kisaran 10-11%, yang mana masih jauh dari harapan 15%, walau anggaran belanja negara terus mencetak rekor tertinggi setiap tahunnya. Hal inilah yang mendasari urgensi penelitian ini untuk menganalisis kembali secara empiris bagaimana sebenarnya pengaruh belanja pemerintah dan pertumbuhan ekonomi terhadap *tax ratio* Indonesia di tengah dinamika pemulihan ekonomi nasional dan global.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas serta adanya kesenjangan penelitian terdahulu, maka peneliti ingin meneliti “**Pengaruh Belanja Pemerintah Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap *Tax ratio* Indonesia**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. *Tax ratio* Indonesia berada di bawah rata-rata negara ASEAN, bahkan menjadi salah satu yang terendah, meskipun memiliki ukuran ekonomi terbesar di kawasan ASEAN.
2. *Tax ratio* menurun mulai dari tahun 2023 sampai dengan 2025
3. Pada tahun 2020, 2024, dan 2025 belanja pemerintah mengalami peningkatan namun *tax ratio* justru mengalami penurunan.

¹⁹ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024* (Jakarta: Bappenas, 2020).

4. Pada tahun 2021 dan 2022 belanja pemerintah mengalami penurunan namun *tax ratio* justru mengalami peningkatan.
5. Pada tahun 2025 pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan namun *tax ratio* mengalami penurunan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apakah Belanja Pemerintah berpengaruh terhadap *Tax ratio* di Indonesia?
2. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap *Tax ratio* di Indonesia?
3. Apakah Belanja Pemerintah dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara simultan terhadap *Tax ratio* di Indonesia?

D. Definisi Operasional Variabel

Defenisi operasional adalah definisi yang dirumuskan oleh peneliti tentang istilah-istilah yang ada pada masalah peneliti dengan maksud untuk menyamakan persepsi antara peneliti dengan orang-orang yang terkait dengan penelitian.²⁰

Tabel I. 2 Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi Operasional Variabel	Skala
1.	<i>Tax ratio</i> (Variabel Y)	<i>Tax ratio</i> adalah indikator kinerja fiskal yang menunjukkan kemampuan pemerintah dalam menghimpun penerimaan pajak	Rasio

²⁰ Benny S. Pasaribu et al., *Metodoogi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis* (Media Edu Pustaka, 2022). Hlm. 65.

		relatif terhadap ukuran perekonomian nasional, yang diukur melalui perbandingan total penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto. ²¹	
2.	Belanja Pemerintah (Variabel X1)	Belanja pemerintah merupakan seluruh pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa, subsidi, transfer, dan investasi publik yang bertujuan mendorong aktivitas ekonomi dan memperluas basis pajak. ²²	Rasio
3.	Pertumbuhan Ekonomi (Variabel X2)	Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kapasitas produksi suatu negara yang tercermin dari perubahan Produk Domestik Bruto riil dari satu periode ke periode berikutnya. ²³	Rasio

E. Batasan Masalah

Peneliti memberikan batasan masalah agar penelitian ini lebih terarah dan fokus pada topik yang diteliti. Penelitian ini hanya memfokuskan pada analisis pengaruh belanja pemerintah dan pertumbuhan ekonomi terhadap *tax ratio* Indonesia periode 1991-2025.

²¹ Richard M Bird and Eric M Zolt, "Redistribution via Taxation: The Limited Role of the Personal Income Tax in Developing Countries," *World Development* 66, 2015, 625–39. Hlm. 630.

²² Robert J Barro, "Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth," *Journal of Political Economy* 98, no. 5, 1990, 103–202. Hlm 150.

²³ David Romer, "Advanced Macroeconomics and Growth," *Journal of Economic Perspectives* 26, no. 2, 2012, 3–24. Hlm. 8.

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh belanja pemerintah terhadap *tax ratio* di Indonesia periode 1991-2025.
2. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap *tax ratio* di Indonesia periode 1991-2025.
3. Untuk menganalisis pengaruh belanja pemerintah dan pertumbuhan ekonomi secara simultan terhadap *tax ratio* di Indonesia periode 1991-2025.

G. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi empiris terhadap pengembangan teori keuangan publik, khususnya teori *tax buoyancy* dan hipotesis *spend-tax*, dengan memperkaya bukti mengenai hubungan antara belanja pemerintah, pertumbuhan ekonomi, dan *tax ratio* dalam konteks negara berkembang. Hasil penelitian ini memperjelas mekanisme transmisi kebijakan fiskal dalam meningkatkan rasio pajak secara berkelanjutan

2. Manfaat Empiris.

Penelitian ini menyajikan bukti empiris terbaru mengenai pengaruh belanja pemerintah dan pertumbuhan ekonomi terhadap *tax ratio* Indonesia pada periode pemulihan ekonomi pasca pandemi. Temuan

penelitian dapat menjadi rujukan dalam menjelaskan fenomena stagnasi *tax ratio* meskipun belanja negara dan pertumbuhan ekonomi meningkat.

3. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pemerintah, otoritas pajak, akademisi, dan masyarakat dalam memahami serta meningkatkan efektivitas kebijakan fiskal guna mendorong peningkatan *tax ratio* di Indonesia.

H. Sistematika Pembahasan

Agar skripsi ini tertera dan memudahkan penelitian dalam menyusunnya maka sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I, menjelaskan tentang latar belakang masalah sesuai sesuai dengan fenomena yang terjadi ditempat objek penelitian, identifikasi masalah yang mengidentifikasi masalah latar belakang, batasan masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

BAB II, membahas mengenai landasn teori, penelitian terdahulu, kerangka pikir digunakan untuk menjelaskan pembaca tentang variabel variabel penelitian dan hipotesis.

BAB III, bab ini menguraikan tentang metode penelitian, lokasi dan waktu penelitian, responden penelitian yaitu UMKM bidang kuliner Kota Padangsidimpuan, jenis penelitian, populasi dan sampel, sumber data dan instrumen pengumpulan data.

BAB IV, berisi tentang paparan data atau hasil penelitian dan pembahasan yang tersusun atas hasil-hasil penelitian yang merupakan kumpulan data-data yang diperoleh peneliti.

BAB V, penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Secara umum, seluruh sub bahasa yang ada dalam penutup adalah membahas tentang kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini setelah menganalisis data dan memperoleh hasil dari penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Maqashid Shariah

Teori *maqashid shariah* digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan bahwa kebijakan fiskal negara, termasuk belanja pemerintah dan optimalisasi *tax ratio*, harus diarahkan pada terciptanya kemaslahatan masyarakat (*maslahah al-ummah*). Dalam perspektif ekonomi islam, negara (*daulah*) memiliki tanggung jawab menjaga kesejahteraan sosial, stabilitas ekonomi, dan keadilan distribusi melalui pengelolaan penerimaan pajak dan belanja negara yang efektif.¹ *Maqashid shariah* merupakan tujuan syariat Islam yang berorientasi pada pembangunan manusia dan kesejahteraan yang memiliki 5 pilar penting, sebagai berikut:

a. *Hifdz Al-Din* (Menjaga Agama)

Hifdz al-din menekankan pentingnya keadilan, transparansi, dan stabilitas sosial dalam kebijakan publik. Dalam penelitian ini, pengelolaan pajak dan belanja pemerintah harus dilakukan secara adil agar mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap negara (*daulah*), sehingga kepatuhan pajak dan *tax ratio* dapat meningkat.

b. *Hifdz al-Nafs* (Menjaga Jiwa)

¹ Amelia Fauzia and Muhamad Nafik Hadi Ryandono, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2022). Hlm. 24.

Hifdz al-nafs berkaitan dengan perlindungan kesejahteraan masyarakat melalui kesehatan, bantuan sosial, dan pelayanan publik. Dalam penelitian ini, belanja pemerintah pada sektor produktif mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperkuat aktivitas ekonomi, dan mendorong peningkatan penerimaan pajak negara.²

c. *Hifdz al-‘Aql* (Menjaga Akal)

Hifdz al-‘aql menekankan pentingnya pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia sebagai dasar pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan akan meningkatkan produktivitas masyarakat sehingga memperluas basis pajak dan memperkuat *tax ratio* Indonesia.

d. *Hifdz al-Nasl* (Menjaga Keturunan)

Hifdz al-nasl berkaitan dengan keberlanjutan pembangunan dan stabilitas fiskal jangka panjang. Dalam penelitian ini, optimalisasi *tax ratio* penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap utang dan menjaga kesejahteraan generasi mendatang melalui pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

e. *Hifdz al-Mal* (Menjaga Harta)

Hifdz al-mal berkaitan dengan pengelolaan harta dan keuangan negara secara adil untuk menciptakan kemaslahatan publik. Dalam penelitian ini, pajak dipandang sebagai instrumen fiskal negara untuk

² Didin Hafidhuddin, *Manajemen Fiskal Syariah: Zakat Dan Pajak Dalam Pembangunan* (Bogor: IPB Press, 2024). Hlm. 49-51.

membiayai pembangunan, memperkuat kapasitas fiskal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi *tax ratio*.³

Dalam perspektif fiskal, pajak dan belanja pemerintah merupakan instrumen penting dalam mencapai kemaslahatan publik. Pajak digunakan sebagai sumber pembiayaan negara untuk menyediakan layanan publik, sedangkan belanja pemerintah diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip *maqashid syariah* dalam menjaga harta (*hifz al-maal*), yaitu memastikan bahwa kekayaan dikelola secara adil dan tidak disalah gunakan. Prinsip keadilan dalam pengelolaan harta juga ditegaskan dalam Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁴

Tafsir Al-Misbah, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat tersebut menekankan kewajiban pemerintah dalam menjalankan amanah publik secara adil, termasuk dalam pengelolaan kekayaan negara dan

³ Zaki Mubarak, *Kebijakan Pajak Dalam Perspektif Maqashid Syariah* (Yogyakarta: Andi Offset, 2023). Hlm. 58-60.

⁴ QS. An-Nisa (4) : 29

kebijakan ekonomi.⁵ Dalam penelitian ini, pengelolaan pajak dan belanja pemerintah harus dilakukan secara transparan agar mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memperkuat *tax ratio* Indonesia.

2. Teori Keynesian

Teori Keynesian menjelaskan bahwa perekonomian suatu negara sangat dipengaruhi oleh permintaan agregat, yang terdiri dari konsumsi, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor neto. Dalam teori ini, pemerintah memiliki peran aktif dalam mengendalikan perekonomian, terutama melalui kebijakan fiskal seperti peningkatan belanja pemerintah dan pengelolaan pajak. Ketika terjadi penurunan aktivitas ekonomi, pemerintah dapat meningkatkan belanja untuk mendorong permintaan agregat sehingga pertumbuhan ekonomi kembali meningkat.⁶

Dalam konteks penelitian ini, teori Keynesian relevan untuk menjelaskan hubungan antara belanja pemerintah dan pertumbuhan ekonomi terhadap *tax ratio*. Peningkatan belanja pemerintah dapat mendorong aktivitas ekonomi, yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan masyarakat dan basis pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal yang ekspansif dapat berdampak pada peningkatan penerimaan negara. Selain itu, teori Keynesian juga menekankan bahwa dalam kondisi tertentu, peningkatan pajak tidak selalu menurunkan aktivitas ekonomi jika diimbangi dengan belanja pemerintah yang efektif.

⁵ M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002). Hlm. 584-585.

⁶ N Gregory Mankiw, *Pengantar Ekonomi Makro (Edisi Indonesia)* (Jakarta: Salemba Empat, 2023). Hlm. 67.

Dengan demikian, keseimbangan antara penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi.⁷

3. *Tax buoyancy* dan *Tax Elasticity*

Teori *tax buoyancy* dan *tax elasticity* menjelaskan sensitivitas penerimaan pajak terhadap perubahan output ekonomi. Jika pertumbuhan ekonomi meningkat, tetapi penerimaan pajak tidak bertambah lebih cepat, maka *tax buoyancy* bernilai kurang dari satu, yang berarti pertumbuhan ekonomi belum memberikan dampak signifikan terhadap penerimaan pajak dan *tax ratio* tetap rendah. Sebaliknya, apabila nilai *buoyancy* lebih besar dari satu, maka peningkatan ekonomi memberikan dampak positif terhadap pajak dan *tax ratio* akan meningkat. Dalam konteks penelitian ini, teori Keynesian digunakan untuk menjelaskan hubungan antara belanja pemerintah dan *tax ratio*. Secara teoritis, peningkatan belanja pemerintah seharusnya mampu meningkatkan penerimaan pajak melalui peningkatan aktivitas ekonomi. Namun, dalam praktiknya, hubungan tersebut tidak selalu berjalan secara optimal, terutama jika belanja pemerintah tidak produktif atau tidak efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, teori Keynesian menjadi landasan penting dalam menganalisis pengaruh kebijakan fiskal terhadap *tax ratio* Indonesia.⁸

⁷ Hari Priyono, *Manajemen Perpajakan* (Malang: Madani, 2022). Hlm.12.

⁸ M L Jhingan, *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016). Hlm.54.

4. *Tax Ratio*

a. Pengertian *Tax ratio*

Tax ratio merupakan indikator utama dalam ekonomi publik yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu negara dalam menghimpun penerimaan pajak dari aktivitas ekonomi. Secara umum, *tax ratio* dihitung sebagai perbandingan antara total penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB) dalam suatu periode tertentu. Konsep *tax ratio* mencerminkan tingkat mobilisasi sumber daya domestik melalui sistem perpajakan. Semakin tinggi *tax ratio*, maka semakin besar kontribusi pajak terhadap perekonomian nasional. Hal ini menunjukkan bahwa negara mampu memanfaatkan potensi ekonomi untuk meningkatkan penerimaan negara.⁹

Tax ratio juga digunakan sebagai indikator untuk melihat kinerja fiskal suatu negara. Negara dengan *tax ratio* tinggi umumnya memiliki sistem perpajakan yang lebih efektif dan tingkat kepatuhan yang lebih baik dibandingkan negara dengan *tax ratio* rendah. Selain itu, *tax ratio* dapat mencerminkan struktur ekonomi suatu negara. Negara yang memiliki sektor formal yang dominan cenderung memiliki *tax ratio* yang lebih tinggi dibandingkan negara dengan sektor informal yang besar. Dengan demikian, *tax ratio* tidak hanya menggambarkan besarnya penerimaan pajak, tetapi juga

⁹ Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan: Konsep, Sistem, Dan Implementasi* (Bandung: Rekayasa Sains, 2023). Hlm. 41.

mencerminkan efektivitas kebijakan fiskal dan kualitas sistem perpajakan dalam suatu negara.¹⁰

b. *Tax ratio* Dalam Perspektif Islam

Dalam perspektif Islam, konsep *tax ratio* dapat dipahami sebagai kemampuan negara dalam menghimpun sumber daya keuangan dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan publik dan menjaga kemaslahatan. Dalam sistem ekonomi Islam, pungutan yang menyerupai pajak dikenal dalam bentuk zakat, kharaj, jizyah, dan ushur, yang memiliki tujuan utama untuk menciptakan keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang merata. Meskipun istilah *tax ratio* tidak digunakan secara eksplisit, konsep optimalisasi penerimaan negara untuk kesejahteraan masyarakat telah lama menjadi bagian dari sistem ekonomi Islam.¹¹

Islam menekankan bahwa pengelolaan harta publik harus dilakukan secara adil dan transparan. Hal ini tercermin dalam Al-Qur'an yang menyatakan bahwa harta tidak boleh beredar hanya di kalangan orang kaya saja. Prinsip ini menunjukkan bahwa pengumpulan dan distribusi dana publik, termasuk pajak, harus bertujuan untuk menciptakan keseimbangan ekonomi dalam masyarakat. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Hasyr: 7, sebagai berikut:

¹⁰ Waluyo, *Perpajakan Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2022).Hlm. 22.

¹¹ Didin Hafidhuddin, *Manajemen Fiskal Syariah: Zakat Dan Pajak Dalam Pembangunan* (Bogor: IPB Press, 2024). Hlm. 56.

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Artinya: Apa saja harta rampasan (fai') yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk negeri-negeri, maka itu adalah untuk Allah, Rasul, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.¹²

Tafsir *Al-Munir* karya Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa ayat tersebut menjadi dasar penting dalam pengelolaan keuangan negara (*baitul mal*) untuk kepentingan masyarakat luas, terutama kelompok lemah dan masyarakat miskin.¹³ Pengeluaran pemerintah harus diarahkan pada sektor produktif seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan bantuan sosial agar mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata.

Ayat tersebut menegaskan bahwa distribusi kekayaan harus merata, sehingga pengumpulan dana publik seperti pajak atau zakat harus diarahkan untuk kepentingan masyarakat luas. Ayat ini menegaskan bahwa tujuan utama pengelolaan harta publik adalah untuk mencegah terjadinya konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu. Dalam konteks modern, prinsip ini sejalan dengan fungsi *tax ratio* yang tidak hanya mengukur besarnya penerimaan pajak, tetapi juga mencerminkan kemampuan negara dalam mendistribusikan kekayaan secara merata. Semakin optimal *tax*

¹² QS. Al-Hasyr (59) : 7

¹³ Wahbah az- Zuhaili, *Tafsir Al-Munir* (Jakarta: Gema Insani, 2013). Hlm. 77-78.

ratio, maka semakin besar pula potensi negara dalam melakukan redistribusi ekonomi.¹⁴

c. Tujuan *Tax ratio*

Tujuan penggunaan *tax ratio* dalam suatu negara dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Menilai efektivitas sistem perpajakan

Tax ratio digunakan untuk mengukur sejauh mana sistem perpajakan mampu menghimpun penerimaan negara dari aktivitas ekonomi yang ada. Semakin tinggi *tax ratio*, semakin efektif sistem perpajakan dalam mengoptimalkan potensi pajak.

2) Mengukur kemampuan pembiayaan negara

Tax ratio menunjukkan sejauh mana penerimaan pajak mampu mendukung pembiayaan pengeluaran pemerintah, termasuk pembangunan dan pelayanan publik.

3) Menilai kemandirian fiskal

Tax ratio digunakan untuk melihat tingkat kemandirian fiskal suatu negara. Negara dengan *tax ratio* tinggi cenderung lebih mandiri karena tidak bergantung pada utang atau sumber pembiayaan eksternal.¹⁵

¹⁴ Zaki Mubarak, *Kebijakan Pajak Dalam Perspektif Maqashid Syariah* (Yogyakarta: Andi Offset, 2023). Hlm. 58.

¹⁵ Chairil Anwar Pohan, *Optimasi Pajak: Strategi Dan Implementasi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2021). Hlm. 32.

4) Sebagai alat evaluasi kebijakan fiskal

Tax ratio dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah kebijakan perpajakan yang diterapkan telah berjalan efektif dalam meningkatkan penerimaan negara.

5) Sebagai alat perbandingan antar negara

Tax ratio memungkinkan perbandingan kinerja perpajakan antar negara, sehingga dapat diketahui posisi suatu negara dalam hal kemampuan menghimpun pajak.

6) Mendukung perencanaan kebijakan ekonomi

Tax ratio menjadi indikator penting dalam perencanaan kebijakan ekonomi, khususnya dalam menentukan strategi peningkatan penerimaan negara dan pengelolaan fiskal yang berkelanjutan.¹⁶

d. Manfaat *Tax ratio*

Sebagai indikator kesehatan keuangan negara, adapun manfaat *tax ratio* terhadap adalah sebagai berikut

1) Sebagai alat evaluasi kinerja perpajakan dan dasar kebijakan fiskal

Tax ratio berfungsi sebagai indikator untuk mengevaluasi kinerja penerimaan pajak dalam suatu negara. Melalui *tax ratio*, pemerintah dapat menilai apakah penerimaan pajak sudah optimal atau masih terdapat potensi yang belum tergali. Selain

¹⁶ Hari Priyono, *Manajemen Perpajakan* (Malang: Madani, 2022). Hlm. 27- 30.

itu, *tax ratio* juga membantu mengidentifikasi kelemahan dalam sistem perpajakan, seperti rendahnya kepatuhan wajib pajak dan kurang optimalnya administrasi perpajakan. Dengan demikian, *tax ratio* menjadi dasar penting dalam merumuskan kebijakan fiskal yang lebih efektif dan tepat sasaran.¹⁷

2) Sebagai indikator stabilitas ekonomi dan alat analisis kebijakan

Dalam konteks ekonomi makro, *tax ratio* digunakan untuk menilai stabilitas dan ketahanan ekonomi suatu negara. *Tax ratio* yang stabil menunjukkan sistem perpajakan yang kuat dan berkelanjutan dalam mendukung pembiayaan negara. Selain itu, *tax ratio* juga berperan sebagai alat analisis dalam pengambilan keputusan ekonomi, karena dapat memberikan gambaran mengenai kemampuan negara dalam mengelola penerimaan pajak secara berkelanjutan.¹⁸

e. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Tax ratio*

Dalam konteks kapasitas fiskal, adapun faktor-faktor yang secara fundamental memengaruhi pencapaian *tax ratio* di Indonesia adalah sebagai berikut:

1) Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi meningkatkan *tax ratio* melalui perluasan basis pajak. Ketika Produk Domestik Bruto (PDB) meningkat, aktivitas produksi, konsumsi, dan investasi ikut naik

¹⁷ Direktorat Jenderal Pajak, *Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak, 2020). Hlm. 14-16.

¹⁸ Siti Resmi, *Perpajakan: Teori Dan Kasus* (Jakarta: Salemba Empat, 2022). Hlm. 21.

sehingga mendorong peningkatan penerimaan pajak. Bukti empiris terbaru menunjukkan hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi dan *tax ratio*, terutama pada negara berkembang dengan ekspansi sektor formal yang kuat.¹⁹

2) Belanja Pemerintah

Belanja pemerintah berperan dalam memengaruhi *tax ratio* melalui dorongan terhadap aktivitas ekonomi dan kebutuhan pembiayaan fiskal. Belanja produktif seperti infrastruktur dan pendidikan meningkatkan output ekonomi dan memperluas basis pajak. Selain itu, peningkatan belanja mendorong optimalisasi penerimaan pajak untuk menjaga keseimbangan fiskal.

3) Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak menentukan efektivitas penerimaan negara. Tingkat kepatuhan yang tinggi mencerminkan sistem administrasi yang baik dan kesadaran wajib pajak yang meningkat. Studi terbaru menunjukkan bahwa literasi pajak dan pengawasan yang kuat berkontribusi langsung terhadap peningkatan *tax ratio*.²⁰

f. Indikator *Tax ratio*

¹⁹ Mardiasmo, *Perpajakan Indonesia* (Yogyakarta: Andi, 2023). Hlm. 77.

²⁰ Waluyo, *Perpajakan Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2022). Hlm. 61.

Dalam penelitian ini, *tax ratio* diukur menggunakan rasio antara penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB). Indikator ini digunakan karena mampu menggambarkan kontribusi pajak terhadap perekonomian. Penggunaan rasio memungkinkan perbandingan antar waktu dan antar negara secara lebih proporsional. Secara matematis, *tax ratio* dihitung dengan membagi penerimaan pajak dengan PDB, kemudian dikalikan 100 persen. Dengan demikian, indikator *tax ratio* dalam penelitian ini digunakan sebagai variabel dependen yang mencerminkan kinerja penerimaan pajak di Indonesia.²¹

5. Belanja Pemerintah

a. Pengertian Belanja Pemerintah

Belanja pemerintah merupakan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Belanja ini mencakup berbagai komponen seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, serta transfer kepada daerah. Dalam konteks ekonomi makro, belanja pemerintah menjadi salah satu instrumen utama kebijakan fiskal yang digunakan untuk mengatur stabilitas ekonomi.²²

²¹ Badan Kebijakan Fiskal, “Kerangka Ekonomi Makro Dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2025” (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024). Hlm. 12.

²² Mudrajat Kuncoro, *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, Dan Kebijakan* (Yogyakarta: Andi Offset, 2023). Hlm. 19.

Belanja pemerintah juga dapat dipahami sebagai bentuk intervensi negara dalam perekonomian untuk mencapai tujuan tertentu, seperti pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, dan stabilitas harga. Melalui belanja pemerintah, negara dapat mengalokasikan sumber daya ke sektor-sektor yang dianggap strategis. Selain itu, belanja pemerintah mencerminkan prioritas pembangunan suatu negara. Alokasi anggaran yang lebih besar pada sektor tertentu menunjukkan fokus kebijakan pemerintah dalam mendorong pembangunan di sektor tersebut.

Belanja pemerintah juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Pengeluaran ini tidak hanya berdampak pada perekonomian jangka pendek, tetapi juga jangka panjang. Dengan demikian, belanja pemerintah tidak hanya sekadar pengeluaran negara, tetapi juga merupakan alat kebijakan yang strategis dalam mengelola perekonomian dan mencapai tujuan pembangunan nasional.²³

b. Belanja Pemerintah Dalam Perspektif Islam

Belanja pemerintah dalam perspektif Islam dipahami sebagai bentuk pengeluaran negara yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjaga kesejahteraan umum. Dalam sistem ekonomi Islam, pengeluaran negara tidak hanya bersifat

²³ N Gregory Mankiw, *Macroeconomics* (New York: Worth Publishers, 2021). Hlm. 33.

administratif, tetapi juga memiliki dimensi moral dan sosial yang kuat. Negara memiliki tanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya secara tepat guna demi tercapainya kemaslahatan masyarakat. Hal ini mencakup penyediaan layanan publik, pembangunan infrastruktur, serta perlindungan terhadap kelompok yang rentan.²⁴ Prinsip penggunaan harta untuk kepentingan umum ditegaskan dalam Al-Qur'an melalui QS. Al-Baqarah ayat 195 sebagai berikut:

وَأَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ

Artinya : Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, serta berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.²⁵

Tafsir *Fi Zhilalil Qur'an* karya Sayyid Qutb menjelaskan bahwa ayat tersebut menekankan pentingnya pengorbanan harta untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan sosial. Penggunaan harta yang tepat akan menciptakan kekuatan ekonomi dan menjaga stabilitas kehidupan.²⁶ Dalam konteks penelitian ini, belanja pemerintah yang efektif akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperluas aktivitas ekonomi formal, dan memperkuat kapasitas fiskal negara melalui peningkatan *tax ratio*.

²⁴ Edwin Umran Mustafa, *Maqashid Syariah Dalam Kebijakan Publik* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2022). Hlm. 231.

²⁵ QS. Al-Baqarah (2) 195

²⁶ Sayyid Qutb, *Fi Zhilalil Qur'an* (Kairo: Darusy Syuruq, 2003). Hlm. 174.

Konsep dalam ayat tersebut juga berkaitan dengan *maqashid shariah*, khususnya *hifdz al-mal* (menjaga harta) dan *hifdz al-nafs* (menjaga kesejahteraan masyarakat). Pengelolaan fiskal yang baik mencerminkan tanggung jawab negara (*daulah*) dalam menciptakan kemaslahatan publik dan menjaga keberlanjutan pembangunan ekonomi nasional.

c. Tujuan Belanja Pemerintah

Tujuan penggunaan belanja pemerintah dalam suatu negara dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Belanja pemerintah diarahkan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, investasi publik, dan dukungan sektor produktif. Pengeluaran ini memperluas kapasitas produksi serta meningkatkan output nasional sehingga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

2) Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Belanja pemerintah digunakan untuk menyediakan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Pengeluaran ini meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengurangi ketimpangan, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara berkelanjutan.

3) Menjaga Stabilitas Ekonomi

Belanja pemerintah berfungsi sebagai instrumen stabilisasi untuk mengendalikan fluktuasi ekonomi. Dalam kondisi perlambatan, belanja meningkatkan permintaan agregat. Dalam kondisi ekspansi, pengendalian belanja membantu menjaga stabilitas fiskal dan inflasi.²⁷

d. Manfaat Belanja Pemerintah

Manfaat penggunaan belanja pemerintah dalam suatu negara dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi

Belanja pemerintah mendorong peningkatan output nasional melalui pembangunan infrastruktur dan investasi publik. Pengeluaran ini memperluas kapasitas produksi serta menciptakan efek pengganda yang mempercepat pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

2) Mengurangi Ketimpangan Sosial

Belanja pemerintah berperan dalam redistribusi pendapatan melalui program sosial dan penyediaan layanan publik. Kebijakan ini meningkatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar dan menekan kesenjangan ekonomi antar kelompok pendapatan.

²⁷ H R Santoso and Maimun Sholeh, *Ekonomi Pembangunan: Membangun Indonesia Yang Mandiri Dan Berdaya Saing* (Tahta Media Group, 2025). Hlm. 13.

3) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Belanja pada sektor pendidikan dan kesehatan meningkatkan kualitas tenaga kerja. Investasi ini memperkuat produktivitas dan daya saing ekonomi sehingga mendukung pembangunan nasional berkelanjutan.²⁸

e. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Pemerintah

Faktor-faktor yang mempengaruhi belanja pemerintah dalam suatu negara dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi memengaruhi kapasitas fiskal pemerintah dalam menentukan tingkat belanja. Ketika ekonomi tumbuh, penerimaan negara meningkat sehingga pemerintah memiliki ruang fiskal yang lebih besar untuk meningkatkan pengeluaran. Sebaliknya, perlambatan ekonomi akan membatasi belanja karena tekanan pada pendapatan negara.

2) Kebijakan Fiskal Dan Prioritas Pembangunan

Belanja pemerintah ditentukan oleh arah kebijakan fiskal dan prioritas pembangunan nasional. Pemerintah menetapkan alokasi anggaran berdasarkan sektor strategis seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Perubahan kebijakan akan langsung memengaruhi struktur dan besaran belanja pemerintah.

²⁸ Sri Mulyani, *Kebijakan Fiskal Indonesia: Menghadapi Krisis Global* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2021). Hlm. 50.

3) Penerimaan negara

Besarnya belanja pemerintah sangat bergantung pada penerimaan negara, terutama pajak dan penerimaan lainnya. Peningkatan penerimaan memungkinkan ekspansi belanja, sedangkan keterbatasan penerimaan mendorong efisiensi anggaran dan pengendalian pengeluaran.²⁹

4) Stabilitas Ekonomi Makro

Kondisi makroekonomi seperti inflasi, suku bunga, dan nilai tukar memengaruhi kebijakan belanja pemerintah. Dalam kondisi ekonomi tidak stabil, pemerintah cenderung meningkatkan belanja untuk menjaga daya beli dan pertumbuhan. Sebaliknya, dalam kondisi stabil, belanja difokuskan pada efisiensi dan keberlanjutan fiskal.³⁰

f. Indikator Belanja Pemerintah

Dalam penelitian ini, belanja pemerintah diukur menggunakan rasio belanja pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Indikator ini digunakan untuk melihat seberapa besar kontribusi pengeluaran pemerintah terhadap total aktivitas ekonomi suatu negara.³¹ Penggunaan indikator dalam bentuk persentase terhadap PDB memberikan keunggulan karena mampu menunjukkan proporsi

²⁹ Sadono Sukirno, *Makroekonomi: Teori Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2022). Hlm. 22-25.

³⁰ Juli Panglima Saragih, *Desentralisasi Fiskal Di Indonesia* (Jakarta: Percetakan Galang, 2022). Hlm, 15.

³¹ Mahmudi, *Manajemen Keuangan Sektor Publik* (Yogyakarta: STIM YKPN, 2022). Hlm 11.

belanja pemerintah secara relatif terhadap ukuran ekonomi. Hal ini memudahkan analisis perbandingan antar periode dan mengurangi bias yang mungkin timbul dari penggunaan data nominal. Selain itu, indikator ini juga mencerminkan peran pemerintah dalam perekonomian. Semakin besar rasio belanja pemerintah terhadap PDB, maka semakin besar pula intervensi pemerintah dalam aktivitas ekonomi.

Dalam beberapa studi, belanja pemerintah juga dapat diukur berdasarkan komposisi pengeluaran, seperti belanja modal dan belanja operasional. Namun, dalam penelitian ini digunakan total belanja pemerintah sebagai indikator utama untuk menjaga konsistensi analisis. Indikator ini dipilih karena relevan dalam menganalisis hubungan antara belanja pemerintah dan *tax ratio* serta memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peran fiskal pemerintah dalam perekonomian.³²

6. Pertumbuhan Ekonomi

a. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses peningkatan kapasitas produksi suatu negara yang tercermin dalam kenaikan output barang dan jasa dalam periode tertentu. Peningkatan ini umumnya diukur melalui perubahan Produk Domestik Bruto (PDB) riil yang mencerminkan pertumbuhan ekonomi tanpa dipengaruhi

³² World Bank, "World Development Indicators" (Washington, DC, 2024).

oleh inflasi. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan perkembangan aktivitas ekonomi yang melibatkan berbagai sektor, seperti industri, perdagangan, dan jasa.³³

Pertumbuhan ekonomi juga berkaitan dengan perubahan struktur ekonomi, di mana terjadi pergeseran dari sektor tradisional ke sektor modern. Hal ini mencerminkan perkembangan ekonomi yang lebih maju. Selain itu, pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan kapasitas negara dalam menyediakan layanan publik melalui peningkatan penerimaan negara. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting yang mencerminkan perkembangan dan kinerja perekonomian secara keseluruhan.³⁴

b. Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam

Pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam tidak hanya dimaknai sebagai peningkatan output atau pendapatan semata, tetapi juga mencakup aspek keberlanjutan, keseimbangan, dan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat. Islam memandang bahwa aktivitas ekonomi harus berjalan seiring dengan nilai moral dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak hanya berorientasi pada kuantitas, tetapi juga kualitas dan kebermanfaatan bagi kehidupan

³³ Jamzani Sodik, *Pengeluaran Pemerintah Dan Pertumbuhan Ekonomi* (Yogyakarta: UPN Press, 2021). Hlm. 32.

³⁴ Novita Sari, *Pertumbuhan Ekonomi Dan Investasi* (Yogyakarta: Deepublish, 2023). Hlm 33.

manusia.³⁵ Prinsip dasar pertumbuhan ekonomi dalam Islam dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, khususnya dalam QS. Hud ayat 61 yang berbunyi:

هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ

Artinya: “Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu sebagai pemakmurnya”.³⁶

Tafsir *Al-Azhar* karya Buya Hamka menjelaskan bahwa manusia diberi amanah oleh Allah SWT untuk mengelola bumi melalui pembangunan, pertanian, perdagangan, dan berbagai aktivitas ekonomi yang memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat.³⁷ Aktivitas ekonomi yang produktif akan menciptakan kemakmuran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Ayat ini menunjukkan bahwa manusia memiliki tanggung jawab untuk memakmurkan bumi, yang dalam konteks ekonomi dapat diartikan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan melalui aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi yang berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi dalam Islam dengan demikian merupakan bagian dari amanah yang harus dijalankan secara optimal dan bertanggung jawab. Lebih lanjut, konsep “memakmurkan bumi” dalam ayat tersebut mencerminkan bahwa pertumbuhan ekonomi

³⁵ Nurul Huda, Dessy Anggraini, and Adam Idris, *Kebijakan Fiskal Dan Moneter Dalam Ekonomi Islami* (Jakarta: Rajawali Pers, 2023). Hlm. 46.

³⁶ QS. Hud (11) : 61

³⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982). Hlm. 203-204.

harus dilakukan secara produktif dan efisien, dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia tanpa merusak keseimbangan alam. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dalam Islam tidak boleh bersifat eksploitatif, melainkan harus memperhatikan aspek keberlanjutan dan keseimbangan lingkungan.³⁸

Selain itu, ayat ini juga mengandung makna bahwa pertumbuhan ekonomi harus memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Aktivitas ekonomi yang dilakukan harus mampu meningkatkan kesejahteraan, menciptakan lapangan kerja, serta mengurangi kemiskinan. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi dalam Islam memiliki dimensi sosial yang kuat dan tidak hanya berfokus pada keuntungan individu.³⁹

Dengan demikian, QS. Hud ayat 61 memberikan landasan bahwa pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam merupakan proses pemanfaatan sumber daya secara optimal untuk kemaslahatan manusia. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dari peningkatan output, tetapi juga dari sejauh mana aktivitas ekonomi tersebut mampu menciptakan kesejahteraan, menjaga keseimbangan lingkungan, dan memenuhi tanggung jawab manusia sebagai pengelola bumi.

³⁸ Amelia Fauzia and Muhamad Nafik Hadi Ryandono, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2022). Hlm. 25.

³⁹ Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam: Antara Teori Dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2021). Hlm. 144.

c. Tujuan Pertumbuhan Ekonomi

Tujuan pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Pertumbuhan ekonomi bertujuan meningkatkan pendapatan per kapita sehingga daya beli masyarakat meningkat dan kebutuhan hidup dapat terpenuhi dengan lebih baik.

2) Menciptakan lapangan kerja

Pertumbuhan ekonomi mendorong ekspansi produksi dan investasi yang menciptakan peluang kerja baru sehingga tingkat pengangguran dapat ditekan.⁴⁰

3) Mengurangi kemiskinan

Pertumbuhan ekonomi yang inklusif mampu meningkatkan distribusi pendapatan dan memberikan kesempatan ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat berpendapatan rendah.⁴¹

d. Manfaat Pertumbuhan Ekonomi

Manfaat pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara dapat dijelaskan sebagai berikut:

⁴⁰ Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2023). Hlm. 95.

⁴¹ Muana Nanga, *Pengantar Ekonomi Makro* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2023). Hlm. 121.

1) Meningkatkan penerimaan negara

Pertumbuhan ekonomi memperluas basis pajak sehingga penerimaan negara meningkat dan mendukung pembiayaan pembangunan.

2) Mendorong investasi

Pertumbuhan ekonomi yang stabil meningkatkan kepercayaan investor sehingga arus investasi meningkat dan memperkuat kapasitas produksi.

3) Meningkatkan kualitas hidup

Pertumbuhan ekonomi meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sehingga kualitas hidup meningkat.⁴²

e. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Sumber Daya Manusia

Kualitas tenaga kerja memengaruhi produktivitas ekonomi. Pendidikan dan keterampilan yang baik meningkatkan output dan efisiensi produksi.

⁴² Tulus T H Tambunan, *Perekonomian Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2022). Hlm. 21-23.

2) Investasi Dan Modal

Akumulasi modal meningkatkan kapasitas produksi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

3) Teknologi

Kemajuan teknologi meningkatkan efisiensi produksi dan inovasi sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi.

4) Kebijakan Pemerintah

Kebijakan fiskal dan moneter yang tepat menciptakan stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan melalui peningkatan investasi dan konsumsi.⁴³

f. Indikator Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi diukur menggunakan perubahan PDB riil dari waktu ke waktu. Indikator ini mencerminkan peningkatan output ekonomi secara nyata. Penggunaan PDB riil bertujuan untuk menghilangkan pengaruh inflasi sehingga memberikan gambaran yang lebih akurat. Pertumbuhan ekonomi dinyatakan dalam bentuk persentase (%), yang memudahkan interpretasi dan analisis. Indikator ini memungkinkan perbandingan antar periode waktu secara konsisten. Selain itu, indikator ini juga digunakan secara luas dalam penelitian ekonomi dan analisis kebijakan. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan selisih PDB tahun berjalan dengan tahun sebelumnya.

⁴³ Sujana Ismaya, *Pengantar Ekonomi Makro* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2021). Hlm. 133.

Indikator ini memberikan gambaran perkembangan ekonomi secara keseluruhan. Dalam penelitian ini digunakan pertumbuhan PDB tahunan sebagai indikator utama. Indikator ini relevan untuk menganalisis hubungan dengan *tax ratio* dan belanja pemerintah. Dengan demikian, indikator pertumbuhan ekonomi memberikan dasar yang kuat dalam analisis ekonomi makro.⁴⁴

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Tujuan ditampilkannya hasil penelitian terdahulu adalah untuk memberikan dukungan terhadap hipotesisi yang diajukan dalam penelitian ini. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu beserta hasil yang telah dicapai:

Tabel II. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	T Dias, J. R., Iglesias, S Gonçalves, (Economic Modelling, Vol. 134 No 1 2025).	<i>The Inequity of Consumption-Based Tax Systems</i>	Menunjukkan bahwa sistem pajak berbasis konsumsi dapat kurang redistributif; relevan untuk aspek kualitas penerimaan pajak dan <i>tax ratio</i> meskipun bukan fokus Indonesia langsung. ⁴⁵
2.	Sri Mulyani Indrawati. (Bulletin of Indonesian Economic Studies, Vol. 60, No. 1 2024).	<i>Indonesia's Fiscal Policy in the Aftermath of the Pandemic</i>	Tax-to-GDP ratio meningkat sedikit dari 9,77% (2019) ke 10,21% (2023); namun tetap rendah; belanja fiskal besar tetapi <i>tax ratio</i> belum optimal. ⁴⁶
3.	Yossinomita, H., Haryadi, N.,	<i>Maximizing economic growth in</i>	Hubungan non-linier antara <i>tax ratio</i> dan

⁴⁴ Badan Pusat Statistik, "Statistik Konsumsi Rumah Tangga Indonesia (Susenas)" (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2024).

⁴⁵ T Dias, J R Iglesias, and S Gonçalves, "The Inequity of Consumption-Based Tax Systems," *Economic Modelling*, Vol 134, no. 1, 2025.

⁴⁶ Sri Mulyani Indrawati, "Indonesia's Fiscal Policy in the Aftermath of the Pandemic," *Journal of Indonesian Fiscal Economy*, Vol 6, no. 1 2024.

	Nainggolan, S., Zulfanetti. (Indonesian Treasury Review Vol.9, No.2 2024).	<i>Indonesia: A model-based exploration of optimal tax ratios</i>	pertumbuhan ekonomi; ada nilai ambang (~15,29%) di mana <i>tax ratio</i> mulai berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan. ⁴⁷
4.	D. Situmorang, (Jurnal Mega Vol 1 No. 1 2023).	<i>Analysis of Central Government Financial Performance: Tax ratio and Government Spending in Indonesia (2015-2022)</i>	Belanja pemerintah meningkat seiring PDB dan <i>tax ratio</i> di atas 10%; namun peningkatan belanja belum secara langsung meningkatkan <i>tax ratio</i> ke target 15%. ⁴⁸
5.	Khairul Amri, (Jurnal Ekonomika, vol. 102 No 2, 6–27, 2023).	<i>Does Tax Effort Moderate the Effect of Government Expenditure on Regional Economic Growth ? A Dynamic Panel Data Evidence from Indonesia Does Tax Effort Moderate the Effect of Government Expenditure on Regional Economic Growth ? A Dynamic Panel Data Evid,</i>	Efek belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dipengaruhi usaha pajak (tax effort) regional; tax effort memoderasi hubungan. ⁴⁹
6.	Keweloh, S., Klein, M., Prüser, J., (Journal of Economic Behavior &	<i>Estimating Fiscal Multipliers by Combining Statistical Identification with</i>	Belanja pemerintah lebih efektif untuk mendorong output dibanding pemotongan pajak; relevan untuk variabel

⁴⁷ H Yossinomita et al., “Maximizing Economic Growth in Indonesia: A Model-Based Exploration of Optimal Tax Ratios,” *Indonesian Treasury Review*, Vol 9, no. 2, 2024, 87–98.

⁴⁸ D Situmorang, “Analysis of Central Government Financial Performance: Tax Ratio and Government Spending in Indonesia (2015-2022),” *MEGA: Hope Economic Journal*, Vol 1, no. 1, 2023, 60–64.

⁴⁹ Khairul Amri, “Does Tax Effort Moderate the Effect of Government Expenditure on Regional Economic Growth? A Dynamic Panel Data Evidence from Indonesia,” *Ekonomika*, Vol 102, no. 2, 2023, 6–27.

	<i>Organization</i> , Vol. 210, no 3, 2023).	<i>Potentially Endogenous Proxies</i>	belanja dan pertumbuhan. ⁵⁰
7.	Al-Hafidz, Waridin, (Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan), Vol. 6 No. 2, 2023)	<i>Long-Term Effect of Taxation as a Fiscal Policy Instrument for National Economic Recovery</i>	Penerimaan pajak sebagai instrumen kebijakan fiskal positif berdampak pada pemulihan ekonomi; belanja dan pajak punya peran sinergis. ⁵¹
8.	Chandra Wijaya dan Dimas Kusuma (Jurnal Keuangan Negara dan Kebijakan Publik), Vol. 7, No. 1 (2023)	Belanja Pemerintah dan Stabilitas Fiskal di Indonesia	Belanja pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax ratio</i> karena sebagian besar pengeluaran negara masih bersifat konsumtif dan belum optimal dalam meningkatkan produktivitas ekonomi. ⁵²
9.	D.D. Maryantika, JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia), Vol. 8, No. 2, 2022, pp. 450-465. (2022).	<i>Determinants of tax revenue in Indonesia with economic growth and government spending</i>	Belanja pemerintah dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak; pertumbuhan ekonomi memediasi pengaruh belanja pemerintah. ⁵³
10.	Andi Pratama, Salsabila Putri, dan Rizky Kurniawan, (Jurnal Ekonomi Pembangunan	Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan <i>Tax ratio</i> pada Negara Berkembang	Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax ratio</i> karena peningkatan output ekonomi tidak selalu diikuti peningkatan

⁵⁰ S Keweloh, M Klein, and J Prüser, "Estimating Fiscal Multipliers by Combining Statistical Identification with Potentially Endogenous Proxies," *Journal of Economic Behavior & Organization*, Vol 210, no. 3, 2023.

⁵¹ Al- Hafidz, "Long-Term Effect of Taxation as a Fiscal Policy Instrument for National Economic Recovery," *Waridin Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, Vol 6, no. 2, 2023.

⁵² Chandra Wijaya and Dimas Kusuma, "Belanja Pemerintah Dan Stabilitas Fiskal Di Indonesia," *Jurnal Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik* Vol 7, no. 1, 2023, 45–58.

⁵³ D D Maryantika and S Wijaya, "Determinants of Tax Revenue in Indonesia with Economic Growth as a Mediation Variable," *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, Vol 8, no. 2, 2022, 450–65.

	Indonesia), Vol. 24, No. 3 (2022)		penerimaan pajak secara proporsional. ⁵⁴
11.	Fina Silfiani, Andar Febriansyah, (International Journal of Current Science Research and Review Vol 5 No. 3, 2022).	<i>Effect of Inflation, Economic Growth, and Tax Rates on Tax Revenue in Indonesia</i>	Pertumbuhan ekonomi dan tarif pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak; <i>tax ratio</i> rendah juga terkait kepatuhan dan potensi pajak yang belum ditangani. ⁵⁵
12	Andi Saputra dan Rahmat Hidayat, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol. 13, No. 2 (2022).	Pengaruh Belanja Pemerintah terhadap Penerimaan Pajak di Indonesia	Belanja pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak karena peningkatan pengeluaran pemerintah mampu mendorong aktivitas ekonomi dan memperluas basis pajak. ⁵⁶
13.	Rizka Rahmawati Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia (2021).	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap <i>Tax ratio</i> di Negara Berkembang	Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap <i>tax ratio</i> karena peningkatan aktivitas ekonomi mampu memperluas basis pajak dan meningkatkan penerimaan negara. ⁵⁷

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Penelitian T Dias, J. R., Iglesias, S Gonçalves memiliki persamaan dengan penelitian ini dalam fokus terhadap sistem perpajakan dan dampaknya terhadap perekonomian. Kedua penelitian sama-sama

⁵⁴ Andi Pratama, Salsabila Putri, and Rizky Kurniawan, "Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Tax Ratio Pada Negara Berkembang," *Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Vol 24, no. 3 2022.

⁵⁵ Fina Silfiani and Andar Febyansyah, "Effect of Inflation, Economic Growth, and Tax Rates on Tax Ratios in Asian Countries in the Period 2015-2020," *International Journal of Current Science Research and Review* Vol 5, no. 3, 2022, 781–94.

⁵⁶ Andi Saputra and Rahmat Hidayat, "Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Penerimaan Pajak Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 13, no. 2, 2022, 89–102.

⁵⁷ Rizka Rahmawati, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tax Ratio Di Negara Berkembang" (Universitas Indonesia, 2021).

menempatkan pajak sebagai instrumen penting dalam kebijakan fiskal yang berperan dalam mempengaruhi distribusi pendapatan dan kinerja ekonomi. Perbedaan utama terletak pada fokus penelitian. Dias et al. lebih menekankan pada aspek ketimpangan pajak, khususnya dalam sistem pajak berbasis konsumsi, sedangkan penelitian ini berfokus pada *tax ratio* sebagai indikator kinerja fiskal secara keseluruhan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa penelitian ini memiliki ruang lingkup yang lebih makro. Selain itu, penelitian Dias et al. lebih menyoroti dampak distribusi pajak terhadap kelompok masyarakat, sedangkan penelitian ini lebih menekankan hubungan antara belanja pemerintah, pertumbuhan ekonomi, dan penerimaan pajak. Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif yang berbeda dalam melihat peran pajak dalam perekonomian.

2. Penelitian Sri Mulyani Indrawati memiliki kesamaan dalam fokus terhadap kebijakan fiskal dan *tax ratio* sebagai indikator kinerja penerimaan negara. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif dan analisis kebijakan, sehingga tidak menggunakan teknik ekonometrika secara mendalam. Penelitian ini lebih menekankan pada interpretasi kondisi ekonomi dan kebijakan fiskal pasca pandemi. Perbedaannya terletak pada fokus evaluasi kebijakan fiskal dalam konteks tertentu, sedangkan penelitian ini berfokus pada hubungan antar variabel dalam jangka waktu yang lebih panjang. Dengan demikian, perbedaan ini menunjukkan bahwa penelitian ini memberikan

kontribusi tambahan dalam bentuk analisis empiris yang lebih kuat dibandingkan dengan pendekatan deskriptif.

3. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian Yossinomita, H., Haryadi, N., Nainggolan, S., Zulfanetti dalam penggunaan variabel *tax ratio* dan pertumbuhan ekonomi sebagai fokus utama analisis. Kedua penelitian ini sama-sama bertujuan untuk memahami hubungan antara penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi. Perbedaannya terletak pada pendekatan model yang digunakan. Penelitian ini menggunakan regresi linier berganda, sedangkan penelitian Yossinomita et al. menggunakan model non-linear.
4. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian D. Situmorang dalam penggunaan variabel belanja pemerintah dan *tax ratio* sebagai indikator kinerja fiskal. Kedua penelitian ini sama-sama bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan fiskal dalam meningkatkan penerimaan negara. Teknik analisis yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi sederhana. Perbedaannya terletak pada hasil penelitian, di mana Situmorang menemukan bahwa belanja pemerintah tidak memiliki pengaruh langsung terhadap *tax ratio*. Hal ini menunjukkan adanya ketidakefisienan dalam pengelolaan belanja pemerintah. Penelitian ini mencoba menguji kembali hubungan tersebut dengan model yang lebih kompleks dan periode data yang lebih panjang untuk memperoleh hasil yang lebih akurat. Perbedaan ini menunjukkan

adanya inkonsistensi hasil penelitian yang menjadi dasar penting bagi penelitian ini untuk dilakukan.

5. Penelitian Khairul Amri memiliki kesamaan dengan penelitian ini dalam penggunaan variabel belanja pemerintah dan pertumbuhan ekonomi sebagai bagian dari kebijakan fiskal. Kedua penelitian ini sama-sama bertujuan untuk menganalisis bagaimana kebijakan fiskal mempengaruhi kinerja ekonomi dan penerimaan negara. Perbedaannya terletak pada penggunaan variabel moderasi berupa tax effort yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara belanja pemerintah dan pertumbuhan ekonomi sedangkan dalam penelitian ini tidak menggunakan variabel moderasi, sehingga lebih menekankan pada hubungan langsung antar variabel. Perbedaan ini menunjukkan adanya penyederhanaan model dalam penelitian ini untuk memperoleh hasil yang lebih fokus.
6. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian Keweloh, S., Klein, M., Prüser, J., dalam fokus pada kebijakan fiskal dan belanja pemerintah. Kedua penelitian ini membahas dampak kebijakan fiskal terhadap perekonomian. Teknik analisis yang digunakan adalah model ekonometrika lanjutan yang mengukur multiplier fiskal. Perbedaannya terletak pada cakupan penelitian yang bersifat global. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada Indonesia. Perbedaan ini menunjukkan bahwa penelitian ini lebih kontekstual dan spesifik.

7. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian Al-Hafidz dalam fokus terhadap pajak sebagai instrumen kebijakan fiskal. Kedua penelitian ini sama-sama membahas peran pajak dalam mendukung perekonomian. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis ekonometrika jangka panjang yang bertujuan untuk melihat hubungan antar variabel dalam periode waktu yang panjang. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, di mana penelitian ini lebih menekankan pada dampak jangka panjang pajak terhadap pemulihan ekonomi. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada hubungan antara belanja pemerintah, pertumbuhan ekonomi, dan *tax ratio* dalam jangka waktu tertentu. Perbedaan ini menunjukkan bahwa penelitian ini memberikan perspektif yang berbeda dengan menekankan hubungan antar variabel secara simultan.
8. Persamaan penelitian Chandra Wijaya dan Dimas Kusuma dengan penelitian ini terletak pada penggunaan variabel belanja pemerintah dan *tax ratio* sebagai indikator fiskal. Kedua penelitian sama-sama meneliti bagaimana pengeluaran negara mempengaruhi kemampuan pemerintah dalam menghimpun penerimaan pajak. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi data time series dengan pendekatan kuantitatif untuk melihat hubungan jangka pendek dan jangka panjang antar variabel. Pendekatan ini relevan dengan penelitian saat ini yang juga menggunakan data time series Indonesia. Perbedaannya adalah penelitian Wijaya dan Kusuma lebih menekankan pada dampak negatif dari belanja

pemerintah yang berlebihan terhadap stabilitas fiskal, sedangkan penelitian ini tidak hanya fokus pada belanja pemerintah tetapi juga memasukkan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel independen tambahan.

9. Penelitian D.D. Maryantika memiliki kesamaan dengan penelitian ini dalam penggunaan variabel belanja pemerintah dan pertumbuhan ekonomi sebagai faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak. Pendekatan yang digunakan bersifat kuantitatif dengan analisis hubungan antar variabel ekonomi. Dari sisi teknik analisis, penelitian ini menggunakan regresi linier untuk menguji hubungan antara variabel independen dan dependen. Namun, perbedaan utama terletak pada model penelitian yang digunakan. Sementara itu, penelitian ini tidak menggunakan variabel mediasi dan lebih fokus pada pengaruh langsung belanja pemerintah dan pertumbuhan ekonomi terhadap *tax ratio*. Perbedaan ini menunjukkan adanya pendekatan yang berbeda dalam melihat hubungan antar variabel.
10. Persamaan penelitian Andi Pratama, Salsabila Putri, dan Rizky Kurniawan dengan penelitian ini terletak pada penggunaan variabel pertumbuhan ekonomi dan *tax ratio* dalam analisis kebijakan fiskal. Kedua penelitian sama-sama mencoba melihat apakah pertumbuhan ekonomi mampu meningkatkan kapasitas penerimaan negara. Teknik analisis yang digunakan adalah pendekatan panel data dengan metode ekonometrika untuk membandingkan beberapa negara berkembang.

Pendekatan ini berbeda dengan penelitian sekarang yang hanya berfokus pada Indonesia. Perbedaannya adalah penelitian Pratama dkk. menggunakan cakupan lintas negara sehingga hasil penelitian lebih bersifat umum, sedangkan penelitian ini lebih spesifik pada kondisi fiskal Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menambahkan variabel belanja pemerintah dalam model analisis.

11. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian Fina Silfiani, Andar Febriansyah dalam penggunaan variabel pertumbuhan ekonomi dan penerimaan pajak. Kedua penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis hubungan antar variabel. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda, yang memungkinkan analisis pengaruh beberapa variabel independen terhadap satu variabel dependen. Perbedaannya terletak pada jumlah variabel yang digunakan. Penelitian ini menambahkan variabel lain seperti inflasi dan tarif pajak. Sementara itu, penelitian ini hanya fokus pada dua variabel utama untuk memperoleh hasil yang lebih spesifik. Perbedaan ini menunjukkan bahwa penelitian ini lebih terfokus dan sederhana dalam model analisis.
12. Penelitian Andi Saputra dan Rahmat Hidayat memiliki persamaan pada penggunaan variabel belanja pemerintah dan penerimaan pajak dalam konteks kebijakan fiskal Indonesia. Kedua penelitian sama-sama melihat bagaimana pengeluaran pemerintah dapat mempengaruhi kapasitas fiskal negara. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan model regresi untuk menguji hubungan

antar variabel ekonomi makro. Perbedaannya adalah penelitian Saputra dan Hidayat lebih berfokus pada penerimaan pajak secara nominal, sedangkan penelitian ini menggunakan *tax ratio* sebagai indikator utama untuk melihat kemampuan penerimaan pajak terhadap PDB. Selain itu, penelitian ini juga menambahkan variabel pertumbuhan ekonomi sebagai faktor yang mempengaruhi *tax ratio*.

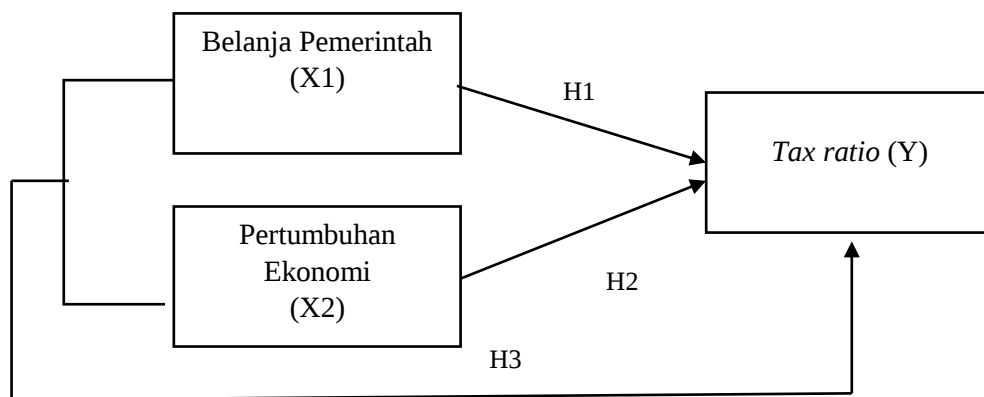
13. Persamaan penelitian Rizka Rahmawati dengan penelitian sekarang ini terletak pada penggunaan variabel pertumbuhan ekonomi dan *tax ratio*. Kedua penelitian sama-sama menganalisis hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemampuan negara dalam menghimpun pajak. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier dengan pendekatan kuantitatif menggunakan data makroekonomi tahunan. Teknik ini sejalan dengan penelitian saat ini yang juga menggunakan pendekatan ekonometrika. Perbedaannya adalah penelitian Rahmawati lebih fokus pada pengaruh langsung pertumbuhan ekonomi terhadap *tax ratio* tanpa memasukkan belanja pemerintah sebagai variabel tambahan. Sedangkan penelitian ini menggabungkan pengaruh belanja pemerintah dan pertumbuhan ekonomi secara simultan.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disintesis dari fakta-fakta, observasi dan telaah kepustakaan. Kerangka berpikir disajikan dengan bagan yang menunjukkan alur pikir peneliti dan

serta keterkaitan antar variabel yang diteliti.⁵⁸ Berikut ini kerangka penelitian ini :

Gambar II. 1 Kerangka Pikir



D. Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara untuk mengetahui kebenaran maka diperlukan pengujian terhadap hipotesis yang ada.⁵⁹ Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Berdasarkan latar belakang penelitian, rumusan masalah dan landasan teori, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H₀₁ : Belanja pemerintah tidak berpengaruh terhadap *tax ratio* di Indonesia.

H_{a1} : Belanja pemerintah berpengaruh terhadap *tax ratio* di Indonesia.

H₀₂ : Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap *tax ratio* di

⁵⁸ Agung Edy Wibowo, *Metodologi Penelitian* (Insania, 2021). Hlm.67.

⁵⁹ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (KBM Indonesia, 2022). Hlm.52.

Indonesia.

H_{a2} : Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap *tax ratio* di Indonesia.

H₀₃ : Belanja pemerintah dan pertumbuhan ekonomi secara simultan tidak berpengaruh terhadap *tax ratio* di Indonesia.

H_{a3} : Belanja pemerintah dan pertumbuhan ekonomi secara simultan berpengaruh terhadap *tax ratio* di Indonesia.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Indonesia. Lokasi penelitian tidak dibatasi pada wilayah administratif tertentu karena penelitian ini menggunakan data sekunder makroekonomi yang bersumber dari instansi resmi pemerintah, seperti Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik. Waktu penelitian mencakup periode pengamatan tahun 1991-2025.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Kuantitatif. Penelitian Kuantitatif yaitu jenis penelitian yang fokus pada pengujian teori atau hipotesis melalui pengukuran variabel-variabel dalam bentuk angka. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian Kuantitatif asosiatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.¹ Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berbentuk time series/tahunan dalam kurun waktu tahun 1991-2025.

C. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek/subjek penelitian yang ditetapkan oleh peneliti.² Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data tahunan terkait *tax ratio*, belanja pemerintah, dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama periode 1991 hingga 2025. Data tersebut

¹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Alfabeta Bandung, 2020). Hlm. 73.

² Imam Machali, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021). Hlm.67.

merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan World Bank. Dengan periode pengamatan dari tahun 1991 sampai dengan 2025, maka jumlah populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 35 tahun observasi, pemilihan data untuk populasi dari tahun 1991 dipilih berdasarkan kesediaan data tahun terakhir data yang tersedia.³

2. Sampel

Sampel adalah subset yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola dari populasi yang lebih besar.⁴ Sampel penelitian ini berupa data time series tahunan Indonesia periode 1991–2025, yang mencakup data *tax ratio*, belanja pemerintah, dan pertumbuhan ekonomi. Periode tersebut menghasilkan 35 tahun pengamatan observasi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampling jenuh, karena seluruh data yang tersedia dalam periode pengamatan digunakan sebagai sampel penelitian.⁵

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dalam pengumpulan data. Teknik dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mencatat data sekunder yang telah dipublikasikan oleh lembaga resmi. Dalam penelitian ini, data yang digunakan berupa data tahunan mengenai *tax ratio*, belanja pemerintah, dan

³ Statistik, “Statistik Konsumsi Rumah Tangga Indonesia (Susenas).”

⁴ Zainuddin Iba and Aditya Wardhana, *Populasi Dan Sampel* (CV. Eureka Media Aksara, 2023). Hlm.55.

⁵ World Bank et al., *World Development Indicators* (Washington, DC: OECD Publishing, 2024).

pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama periode 1991 hingga 2025.⁶ Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui publikasi resmi lembaga pemerintah dan lembaga statistik nasional maupun internasional. Data sekunder dipilih karena penelitian ini menganalisis variabel makroekonomi yang telah terdokumentasi secara sistematis. Instrumen pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu pengumpulan data historis berupa angka statistik tahunan selama periode 1991–2025.⁷ Data yang digunakan meliputi:

1. Data *Tax ratio* Indonesia (penerimaan pajak terhadap PDB) diperoleh dari publikasi resmi Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, Badan Pusat Statistik, serta publikasi ekonomi finansial.⁸
2. Data Belanja Pemerintah (*Government Spending*) dalam persentase terhadap Produk Domestik Bruto diperoleh dari APBN, Kementerian Keuangan, dan Badan Pusat Statistik.⁹
3. Data Pertumbuhan Ekonomi (*GDP Growth Rate*) diperoleh dari Badan Pusat Statistik.¹⁰

Teknik dokumentasi dilakukan melalui penelusuran literatur, laporan keuangan pemerintah, jurnal ilmiah dan database laporan ekonomi resmi guna memastikan validitas dan reliabilitas data yang digunakan.

⁶ Budi Gautama Siregar and H Ali Hardana, *Metode Penelitian EKonomi Dan Bisnis* (Merdeka Kreasi Group, 2022). Hlm. 109.

⁷ Statistik, “Statistik Konsumsi Rumah Tangga Indonesia (Susenas).”

⁸ World Bank et al., “Tax Ratio 2025 Hanya Sebesar 9,31% Dari PDB,” 2024.

⁹ Statistik, “Statistik Konsumsi Rumah Tangga Indonesia (Susenas).”

¹⁰ Statistik, “Statistik Konsumsi Rumah Tangga Indonesia (Susenas).”

E. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis data berbasis ekonometrika menggunakan bantuan software EViews. Pemilihan EViews didasarkan pada kemampuannya dalam mengolah data time series secara akurat, termasuk melakukan estimasi model regresi, pengujian asumsi klasik, serta pengujian statistik secara komprehensif. Selain itu, EViews menyediakan berbagai alat analisis yang memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan hubungan antar variabel secara sistematis.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder berbentuk time series tahunan periode 1991–2025. Oleh karena itu, analisis dilakukan secara bertahap mulai dari pengolahan data, pengujian asumsi klasik, estimasi model regresi, hingga pengujian hipotesis. Tahapan ini dilakukan untuk memastikan bahwa model yang dihasilkan bersifat valid, tidak bias, dan dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara belanja pemerintah, pertumbuhan ekonomi, dan *tax ratio* secara empiris.

Metode utama yang digunakan adalah regresi linier berganda karena penelitian ini melibatkan lebih dari satu variabel independen. Regresi ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel belanja pemerintah dan pertumbuhan ekonomi terhadap *tax ratio* baik secara parsial maupun simultan. Dengan menggunakan EViews, hasil estimasi dapat diperoleh dalam bentuk koefisien regresi, nilai signifikansi, serta indikator statistik

lainnya yang mendukung analisis penelitian.¹¹. Adapun uji uji yang akan digunakan Adalah sebagai berikut:

1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif merupakan tahap awal dalam pengolahan data yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data penelitian. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui nilai rata-rata (mean), nilai maksimum, nilai minimum, serta standar deviasi dari masing-masing variabel, yaitu *tax ratio*, belanja pemerintah, dan pertumbuhan ekonomi. Dengan menggunakan bantuan EViews, peneliti dapat melihat distribusi data secara ringkas sehingga memudahkan dalam memahami pola data sebelum dilakukan analisis lanjutan.¹²

Selain itu, statistik deskriptif juga digunakan untuk mendeteksi adanya penyimpangan data seperti outlier yang dapat mempengaruhi hasil analisis regresi. Nilai standar deviasi yang tinggi menunjukkan adanya variasi data yang besar, sedangkan nilai yang rendah menunjukkan data cenderung homogen. Dengan demikian, analisis ini menjadi dasar penting dalam menentukan kelayakan data untuk dianalisis lebih lanjut.¹³

¹¹ Damodar N Gujarati, Dawn C Porter, and William H Greene, *Basic Econometrics*, 5th ed. (New York: Pearson Education, 2018).

¹² Damodar N Gujarati et al., *Basic Econometrics*, 8th ed. (New York: Pearson Education, 2018). Hlm. 189.

¹³ Agus Tri Basuki and Nano Prawoto, *Analisis Ekonometrika Untuk Ekonomi Dan Bisnis: Implementasi EViews* (Depok: Rajawali Pers, 2022). Hlm. 55.

2. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data residual dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak. Distribusi residual yang normal menunjukkan bahwa model regresi memiliki estimasi yang baik dan dapat digunakan untuk pengujian statistik. Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji Jarque-Bera (*Jarque-Bera Test*). Dasar pengambilan keputusan dilakukan dengan melihat nilai probabilitas (*probability value*). Ketentuan pengujian:

- a. Jika nilai probabilitas $> 0,05$ maka data berdistribusi normal.
- b. Jika nilai probabilitas $< 0,05$ maka data tidak berdistribusi normal.

Residual yang berdistribusi normal menunjukkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas sehingga pengujian hipotesis dapat dilakukan secara valid.¹⁴

3. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan linear yang tinggi antar variabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik tidak boleh memiliki hubungan yang terlalu kuat antar variabel independen karena dapat menyebabkan ketidakstabilan estimasi koefisien regresi. Pengujian multikolinearitas

¹⁴ Setyo Tri Wahyudi, *Konsep Dan Aplikasi Ekonometrika Menggunakan EViews* (Jakarta: Salemba Empat, 2022). Hlm. 88-89.

dilakukan dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF).

Ketentuan pengujian:

- a. Jika nilai VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinearitas.
- b. Jika nilai VIF > 10 maka terjadi multikolinearitas.

Nilai VIF yang rendah menunjukkan bahwa masing-masing variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara independen tanpa adanya hubungan linear yang berlebihan.¹⁵

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui adanya korelasi residual antar periode waktu dalam data *time series*. Autokorelasi dapat menyebabkan model regresi menjadi bias karena residual pada satu periode dipengaruhi oleh residual pada periode sebelumnya. Pengujian autokorelasi dilakukan menggunakan uji Durbin-Watson (*Durbin-Watson Test*). Ketentuan pengujian:

- a. Nilai $-2 < DW < 2$ menunjukkan tidak terjadi autokorelasi.

Model regresi yang tidak mengalami autokorelasi menunjukkan bahwa residual bersifat independen antar periode waktu.¹⁶

5. Analisis Regresi Linier Berganda

Suatu regresi yang lebih dari satu variabel independen. Regresi dapat menjadi linier berganda ketika variabel terikatnya yang dijelaskan

¹⁵ Agus Widarjono, *Ekonometrika: Pengantar Dan Aplikasinya Disertai Panduan EViews* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2023). Hlm 70.

¹⁶ Anwar Hidayat, *Analisis Data Time Series Dengan EViews: Teori Dan Praktik* (Bandung: Alfabeta, 2021). Hlm. 98.

lebih dari satu variabel bebas.¹⁷ Analisis Regresi Berganda ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh belanja pemerintah dan pertumbuhan ekonomi terhadap *tax ratio* Indonesia. Oleh sebab itu peneliti akan menganalisis statistik dari uji regresi berganda. Adapun Persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Dimana:

- Y = (Variabel dependen)
- X1, X2 = (Variabel independen)
- α = Konstanta (nilai Y' apabila X1, X2.... Xn = 0)
- β_1, β_2 = Koefisien regresi
- e = error term

Pada bentuk persamaan regresi linier berganda, peneliti akan menyesuaikannya dengan judul pada variabel skripsi penelitian, yaitu:

$$TR = \alpha + \beta_1 BP + \beta_2 PE + e$$

Dimana:

- TR = *Tax ratio* (Y)
- BP = Belanja Pemerintah (X1)
- PE = Pertumbuhan Ekonomi (X2)
- α = Konstanta
- β_1, β_2 = Koefisien regresi
- e = error term

¹⁷ Moch. Doddy Ariefianto, *Ekonometrika Esensial: Teori Dan Aplikasi Dengan EViews* (Jakarta: Erlangga, 2022). Hlm. 74.

Estimasi dilakukan menggunakan metode Ordinary Least Squares (OLS) pada EViews. Hasil regresi akan menunjukkan arah hubungan serta besarnya pengaruh masing-masing variabel.¹⁸

6. Uji Hipotesis

a. Uji t (Parsial)

Uji t bertujuan untuk mengukur secara terpisah kontribusi yang disebabkan dari variabel bebas terhadap variabel dependen. Dengan membandingkan nilai t- hitung dengan nilai t- tabel dengan tarafsignifikan 0,05.¹⁹ Adapun taraf signifikan yang dipakai adalah 5% (0,05) dengan cara membandingkan t hitung dan t tabel dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Jika $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.
- 2) Jika $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.²⁰

b. Uji F (Simultan)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah secara bersama-sama variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.²¹ Adapun taraf signifikan yang dipakai adalah 5% (0,05) dengan cara membandingkan t hitung dan t tabel dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Jika $F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

¹⁸ Agus Tri Basuki and Nano Prawoto, *Analisis Ekonometrika Untuk Ekonomi Dan Bisnis: Implementasi EViews* (Depok: Rajawali Pers, 2022). Hlm. 17.

¹⁹ Damodar N Gujarati et al., *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan SPSS*, 5th ed. (New York: Pearson Education, 2018). Hlm. 105.

²⁰ Moch. Doddy Ariefianto, *Ekonometrika Esensial: Teori Dan Aplikasi Dengan EViews* (Jakarta: Erlangga, 2022). Hlm. 15.

²¹ Setyo Tri Wahyudi, *Konsep Dan Aplikasi Ekonometrika Menggunakan EViews* (Jakarta: Salemba Empat, 2022). Hlm. 98.

2) Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

c. Koefisien Determinasi (R-Square)

Uji koefisien determinasi (*Coefficient of Determination*) merupakan pengujian statistik yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen dalam suatu model regresi. Koefisien determinasi menunjukkan tingkat kekuatan model regresi dalam menerangkan variasi perubahan variabel dependen yang dipengaruhi oleh variabel independen. Interpretasi nilai koefisien determinasi dilakukan sebagai berikut:

- 1) Nilai R-Square mendekati 1 menunjukkan model regresi memiliki kemampuan penjelasan yang sangat kuat.
- 2) Nilai R-Square mendekati 0 menunjukkan model regresi memiliki kemampuan penjelasan yang lemah.²²

²² Aef Saefullah, *Statistik Untuk Penelitian* (STIE Ganesha, 2024).

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di kawasan Asia Tenggara dan memiliki posisi strategis di antara Benua Asia dan Australia serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia terdiri atas lebih dari 17.000 pulau dengan luas wilayah sekitar 1,9 juta kilometer persegi dan jumlah penduduk mencapai lebih dari 280 juta jiwa pada tahun 2024. Kondisi geografis dan demografis tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan potensi ekonomi terbesar di kawasan Asia dan dunia.¹ Secara administratif, Indonesia terdiri atas 38 provinsi yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki struktur perekonomian yang didukung oleh berbagai sektor, seperti industri pengolahan, perdagangan, pertanian, konstruksi, pertambangan, serta jasa. Keberagaman sumber daya alam dan jumlah penduduk yang besar menjadi modal utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, Indonesia juga merupakan anggota organisasi internasional seperti G20 yang menunjukkan pentingnya posisi Indonesia dalam perekonomian global.²

Perekonomian Indonesia diukur melalui Produk Domestik Bruto (PDB) yang mencerminkan nilai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan dalam

¹ Badan Pusat Statistik, *Statistik Indonesia 2024* (BPS, 2024).

² Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Profil Indonesia* (Sekretariat Negara, 2024).

suatu periode tertentu. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia menunjukkan kinerja ekonomi yang relatif stabil dengan tingkat pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5 persen per tahun, kecuali pada tahun 2020 ketika terjadi kontraksi akibat pandemi COVID-19. Setelah pandemi, perekonomian Indonesia kembali mengalami pemulihan yang ditandai dengan meningkatnya konsumsi rumah tangga, investasi, serta aktivitas perdagangan domestik dan internasional.³ Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, pemerintah memegang peranan penting melalui kebijakan fiskal yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN digunakan sebagai instrumen untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan stabilitas ekonomi. Untuk membiayai berbagai program pembangunan tersebut, pemerintah membutuhkan sumber penerimaan yang memadai, terutama yang berasal dari sektor perpajakan. Oleh karena itu, pajak menjadi komponen utama dalam struktur penerimaan negara Indonesia.⁴ Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberlangsungan pembangunan nasional karena digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, subsidi, serta program perlindungan sosial. Kemampuan pemerintah dalam menghimpun penerimaan pajak sering diukur melalui *tax ratio*, yaitu perbandingan antara penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB). *Tax ratio* menjadi salah satu

³ Badan Pusat Statistik, *Produk Domestik Bruto Indonesia Menurut Pengeluaran Tahun 2024* (BPS, 2025).

⁴ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Nota Keuangan Dan APBN Tahun Anggaran 2024* (Kementerian Keuangan RI, 2024).

indikator yang menunjukkan tingkat kapasitas fiskal suatu negara dalam membiayai pembangunan secara mandiri. Oleh karena itu, penelitian mengenai *tax ratio*, belanja pemerintah, dan pertumbuhan ekonomi menjadi penting untuk memahami kondisi fiskal Indonesia dan faktor-faktor yang memengaruhinya.⁵

Saat ini Indonesia masih berada dalam fase pemulihan dan penguatan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, perekonomian Indonesia tetap menunjukkan kinerja yang relatif stabil dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,03% pada tahun 2024 dan diperkirakan tetap tumbuh di atas 5% pada tahun 2025. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi nasional masih didukung oleh konsumsi rumah tangga, investasi, serta perdagangan domestik yang tetap kuat. Stabilitas pertumbuhan ekonomi ini menjadi modal penting dalam mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁶ Dari sisi fiskal, pemerintah terus mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mempercepat pembangunan. Belanja negara terus diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta berbagai program strategis nasional. Dalam APBN Tahun Anggaran 2025, pemerintah menetapkan belanja negara

⁵ Direktorat Jenderal Pajak, *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2024* (Kementerian Keuangan RI, 2025).

⁶ Badan Pusat Statistik, *Produk Domestik Bruto Indonesia Menurut Pengeluaran Tahun 2024*.

sebesar Rp3.621,3 triliun guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.⁷

Tantangan fiskal Indonesia masih cukup besar. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya *tax ratio* yang masih berada pada kisaran 9% hingga 11% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah dalam menghimpun penerimaan pajak belum sebanding dengan potensi ekonomi nasional yang terus berkembang. Rendahnya *tax ratio* juga mencerminkan masih adanya berbagai kendala seperti tingginya sektor informal, kepatuhan wajib pajak yang belum optimal, serta terbatasnya perluasan basis pajak.⁸ Selain itu, pemerintah juga terus berupaya menjaga stabilitas ekonomi makro melalui pengendalian inflasi dan pengelolaan utang yang berkelanjutan. Tingkat inflasi Indonesia pada tahun 2024 berada dalam rentang sasaran Bank Indonesia sehingga mampu menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas harga. Stabilitas inflasi menjadi faktor penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif serta mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.⁹

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah juga mendorong transformasi ekonomi melalui hilirisasi industri, digitalisasi ekonomi, pengembangan ekonomi hijau, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Berbagai kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan

⁷ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Nota Keuangan Dan APBN Tahun Anggaran 2025* (Kementerian Keuangan RI, 2024).

⁸ Direktorat Jenderal Pajak, *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2024* (Kementerian Keuangan RI, 2025).

⁹ Bank Indonesia, *Laporan Perekonomian Indonesia 2024* (Bank Indonesia, 2025).

produktivitas nasional, memperluas lapangan kerja, dan memperkuat struktur ekonomi Indonesia. Namun, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada kapasitas fiskal pemerintah yang tercermin dari kemampuan menghimpun penerimaan pajak dan mengelola belanja negara secara efektif. Oleh karena itu, hubungan antara belanja pemerintah, pertumbuhan ekonomi, dan *tax ratio* menjadi penting untuk dikaji karena ketiga variabel tersebut memiliki peran strategis dalam mendukung keberlanjutan pembangunan nasional dan kemandirian fiskal Indonesia.¹⁰

B. Deskripsi Data Penelitian

1. *Tax ratio*

Tax ratio merupakan salah satu indikator penting yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah dalam menghimpun penerimaan pajak dibandingkan dengan ukuran perekonomian nasional yang tercermin dalam Produk Domestik Bruto (PDB). Sebagai salah satu sumber utama penerimaan negara, pajak memiliki peran yang sangat penting dalam membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, perkembangan *tax ratio* dapat memberikan gambaran mengenai kondisi penerimaan pajak dan kapasitas fiskal Indonesia dari waktu ke waktu. Untuk mengetahui perkembangan *tax ratio* Indonesia selama periode penelitian tahun 1991–2025, dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel IV. 1 Perkembangan *Tax ratio* Indonesia 1991-2015

¹⁰ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029* (Bappenas, 2025).

Tahun	<i>Tax ratio</i> (%)	Perubahan (%)
1991	11,70	-
1992	11,80	0,10
1993	11,80	0,00
1994	11,90	0,10
1995	11,90	0,00
1996	12,00	0,10
1997	11,80	-0,20
1998	10,50	-1,30
1999	10,80	0,30
2000	11,00	0,20
2001	11,00	0,00
2002	11,50	0,50
2003	11,80	0,30
2004	12,20	0,40
2005	12,50	0,30
2006	12,80	0,30
2007	13,10	0,30
2008	13,31	0,21
2009	11,90	-1,41
2010	12,10	0,20
2011	12,30	0,20
2012	12,47	0,17
2013	12,20	-0,27
2014	11,80	-0,40
2015	11,60	-0,20
2016	10,80	-0,80
2017	9,89	-0,91
2018	10,24	0,35
2019	9,76	-0,48
2020	8,33	-1,43
2021	9,11	0,78
2022	10,38	1,27
2023	10,31	-0,07
2024	10,08	-0,23
2025	9,31	-0,77

Sumber: Data diolah peneliti (2026)

Berdasarkan Tabel IV.1, perkembangan *tax ratio* Indonesia selama periode 1991–2025 menunjukkan beberapa tahun yang tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya, kondisi tersebut terjadi pada tahun 1993, 1995, dan 2001. Pada tahun 1992 *tax ratio* tercatat sebesar

11,80%, kemudian pada tahun 1993 tetap berada pada angka 11,80% sehingga tidak mengalami perubahan. Kondisi serupa terjadi pada tahun 1994 dan 1995, dimana *tax ratio* tetap berada pada angka 11,90%. Selanjutnya, pada tahun 2000 *tax ratio* tercatat sebesar 11,00% dan pada tahun 2001 tetap berada pada angka yang sama yaitu 11,00%.

Perkembangan *tax ratio* yang mengalami kenaikan terjadi pada beberapa periode dengan besaran yang berbeda-beda. Pada tahun 1991 *tax ratio* tercatat sebesar 11,70%, kemudian meningkat menjadi 11,80% pada tahun 1992 atau naik sebesar 0,10%. Tahun 1993 sebesar 11,80% meningkat menjadi 11,90% pada tahun 1994 atau naik sebesar 0,10%. Tahun 1995 sebesar 11,90% kembali meningkat menjadi 12,00% pada tahun 1996 atau naik sebesar 0,10%. Setelah mengalami penurunan pada tahun 1997 dan 1998, *tax ratio* meningkat dari 10,50% pada tahun 1998 menjadi 10,80% pada tahun 1999 atau naik sebesar 0,30%, kemudian meningkat kembali menjadi 11,00% pada tahun 2000 atau naik sebesar 0,20%. Tahun 2001 sebesar 11,00% meningkat menjadi 11,50% pada tahun 2002 atau naik sebesar 0,50%. Tahun 2002 sebesar 11,50% meningkat menjadi 11,80% pada tahun 2003 atau naik sebesar 0,30%, kemudian kembali meningkat menjadi 12,20% pada tahun 2004 atau naik sebesar 0,40%. Tahun 2004 sebesar 12,20% meningkat menjadi 12,50% pada tahun 2005 atau naik sebesar 0,30%, kemudian meningkat menjadi 12,80% pada tahun 2006 atau naik sebesar 0,30%, dan kembali meningkat menjadi 13,10% pada tahun 2007 atau naik sebesar 0,30%.

Tahun 2007 sebesar 13,10% meningkat menjadi 13,31% pada tahun 2008 atau naik sebesar 0,21%, yang sekaligus menjadi nilai *tax ratio* tertinggi selama periode penelitian. Setelah mengalami penurunan pada tahun 2009, *tax ratio* kembali meningkat dari 11,90% pada tahun 2009 menjadi 12,10% pada tahun 2010 atau naik sebesar 0,20%, kemudian meningkat menjadi 12,30% pada tahun 2011 atau naik sebesar 0,20%, dan meningkat menjadi 12,47% pada tahun 2012 atau naik sebesar 0,17%. Tahun 2017 sebesar 9,89% meningkat menjadi 10,24% pada tahun 2018 atau naik sebesar 0,35%. Tahun 2020 sebesar 8,33% meningkat menjadi 9,11% pada tahun 2021 atau naik sebesar 0,78%, kemudian kembali meningkat menjadi 10,38% pada tahun 2022 atau naik sebesar 1,27%. Secara keseluruhan, kenaikan terbesar terjadi pada tahun 2022 sebesar 1,27%, sedangkan kenaikan terkecil terjadi pada tahun 1992, 1994, dan 1996 yang masing-masing sebesar 0,10%.

Perkembangan *tax ratio* yang mengalami penurunan juga terjadi pada beberapa periode selama tahun penelitian. Pada tahun 1996 *tax ratio* tercatat sebesar 12,00%, kemudian menurun menjadi 11,80% pada tahun 1997 atau turun sebesar 0,20%. Tahun 1997 sebesar 11,80% kembali menurun menjadi 10,50% pada tahun 1998 atau turun sebesar 1,30%. Setelah mencapai nilai tertinggi sebesar 13,31% pada tahun 2008, *tax ratio* mengalami penurunan yang cukup besar menjadi 11,90% pada tahun 2009 atau turun sebesar 1,41%. Tahun 2012 sebesar 12,47% menurun menjadi 12,20% pada tahun 2013 atau turun sebesar 0,27%,

kemudian kembali menurun menjadi 11,80% pada tahun 2014 atau turun sebesar 0,40%. Tahun 2014 sebesar 11,80% menurun menjadi 11,60% pada tahun 2015 atau turun sebesar 0,20%, kemudian turun menjadi 10,80% pada tahun 2016 atau turun sebesar 0,80%, dan kembali menurun menjadi 9,89% pada tahun 2017 atau turun sebesar 0,91%. Tahun 2018 sebesar 10,24% menurun menjadi 9,76% pada tahun 2019 atau turun sebesar 0,48%. Tahun 2019 sebesar 9,76% kembali menurun menjadi 8,33% pada tahun 2020 atau turun sebesar 1,43%, yang merupakan penurunan terbesar selama periode penelitian. Setelah mengalami peningkatan pada tahun 2021 dan 2022, *tax ratio* kembali menurun dari 10,38% pada tahun 2022 menjadi 10,31% pada tahun 2023 atau turun sebesar 0,07%, kemudian menurun menjadi 10,08% pada tahun 2024 atau turun sebesar 0,23%, dan kembali menurun menjadi 9,31% pada tahun 2025 atau turun sebesar 0,77%. Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa penurunan *tax ratio* terjadi lebih sering setelah periode kenaikan yang panjang, sehingga memperlihatkan adanya fluktuasi yang cukup dinamis dalam perkembangan *tax ratio* Indonesia selama periode 1991–2025

2. Belanja Pemerintah

Belanja pemerintah merupakan salah satu instrumen fiskal yang digunakan pemerintah untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintahan

dan pembangunan nasional. Besarnya belanja pemerintah mencerminkan peran pemerintah dalam perekonomian melalui penyediaan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan berbagai program pembangunan lainnya. Perkembangan belanja pemerintah dari tahun ke tahun dapat memberikan gambaran mengenai arah kebijakan fiskal yang ditempuh pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan belanja pemerintah Indonesia tahun 1991–2025 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel IV. 2
Perkembangan Belanja Pemerintah Indonesia Tahun 1991–2025

Tahun	Belanja Pemerintah (%)	Perubahan (%)
1991	15,0	-
1992	15,2	0,2
1993	14,8	-0,4
1994	14,5	-0,3
1995	14,2	-0,3
1996	14,5	0,3
1997	15,3	0,8
1998	17,5	2,2
1999	17,8	0,3
2000	16,5	-1,3
2001	19,5	3,0
2002	18,0	-1,5
2003	17,5	-0,5
2004	17,0	-0,5
2005	18,2	1,2
2006	18,0	-0,2
2007	17,8	-0,2
2008	18,5	0,7
2009	16,7	-1,8
2010	14,5	-2,2
2011	15,2	0,7
2012	16,0	0,8
2013	16,2	0,2
2014	15,8	-0,4
2015	15,6	-0,2
2016	15,0	-0,6

Tahun	Belanja Pemerintah (%)	Perubahan (%)
2017	14,8	-0,2
2018	14,9	0,1
2019	14,6	-0,3
2020	16,8	2,2
2021	16,4	-0,4
2022	15,8	-0,6
2023	14,9	-0,9
2024	14,6	-0,3
2025	14,5	-0,1

Sumber: Data diolah peneliti (2026)

Berdasarkan Tabel IV. 2, perkembangan belanja pemerintah yang mengalami kenaikan selama periode penelitian menunjukkan perubahan yang bervariasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 1991 belanja pemerintah tercatat sebesar 15,0%, kemudian pada tahun 1992 mengalami kenaikan sebesar 0,2% menjadi 15,2%. Setelah beberapa tahun mengalami penurunan, belanja pemerintah pada tahun 1995 sebesar 14,2% dan pada tahun 1996 mengalami kenaikan sebesar 0,3%. Tahun 1997 kembali mengalami kenaikan sebesar 0,8%. Tahun 1998 mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 2,2%, kemudian pada tahun 1999 kembali meningkat sebesar 0,3%. Tahun 2001 mengalami kenaikan terbesar selama periode penelitian, yaitu sebesar 3,0%. Tahun 2005 mengalami kenaikan sebesar 1,2%. Pada tahun 2008 meningkat sebesar 0,7%. pada tahun 2011 naik sebesar 0,7%. Tahun 2012 kembali meningkat sebesar 0,8%, dan pada tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 0,2%. Pada tahun 2018 meningkat sebesar 0,1%. Pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 2,2%.

Perkembangan belanja pemerintah yang mengalami penurunan juga terjadi pada beberapa periode selama tahun penelitian. Pada tahun 1992 belanja pemerintah sebesar 15,2%, kemudian pada tahun 1993 mengalami penurunan sebesar 0,4%. Tahun 1994 kembali mengalami penurunan sebesar 0,3%, dan pada tahun 1995 turun sebesar 0,3%. Tahun 1999 tercatat sebesar 17,8%, kemudian pada tahun 2000 mengalami penurunan sebesar 1,3%. Tahun 2001 sebesar 19,5%, selanjutnya pada tahun 2002 mengalami penurunan sebesar 1,5%. Tahun 2003 kembali turun sebesar 0,5%. dan tahun 2004 turun sebesar 0,5%. Tahun 2005 sebesar 18,2%, kemudian pada tahun 2006 mengalami penurunan sebesar 0,2%, dan tahun 2007 kembali turun sebesar 0,2%. Tahun 2008 tercatat sebesar 18,5%, lalu pada tahun 2009 mengalami penurunan sebesar 1,8%. Tahun 2009 sebesar 16,7%, kemudian pada tahun 2010 mengalami penurunan terbesar sebesar 2,2%. Tahun 2013 tercatat sebesar 16,2%, selanjutnya pada tahun 2014 turun sebesar 0,4%. Tahun 2015 turun sebesar 0,2%, tahun 2016 turun sebesar 0,6%, dan tahun 2017 kembali turun sebesar 0,2%. Tahun 2018 sebesar 14,9%, kemudian pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0,3%. Tahun 2020 tercatat sebesar 16,8%, selanjutnya pada tahun 2021 turun sebesar 0,4%, tahun 2022 turun sebesar 0,6%. Tahun 2023 turun sebesar 0,9%, tahun 2024 turun sebesar 0,3%. Pada tahun 2025 kembali turun sebesar 0,1%.

3. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan kemampuan perekonomian dalam menghasilkan barang dan jasa yang tercermin melalui perubahan Produk Domestik Bruto (PDB) dari waktu ke waktu. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi umumnya mencerminkan meningkatnya aktivitas ekonomi, investasi, produksi, serta kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perkembangan pertumbuhan ekonomi menjadi penting untuk dianalisis karena dapat memberikan gambaran mengenai kondisi dan kinerja perekonomian Indonesia selama periode penelitian. Perkembangan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 1991–2025 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel IV. 3 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 1991-2025

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Perubahan (%)
1991	6,95	-
1992	6,46	-0,49
1993	6,50	0,04
1994	7,54	1,04
1995	8,22	0,68
1996	7,82	-0,40
1997	4,70	-3,12
1998	-13,13	-17,83
1999	0,79	13,92
2000	4,92	4,13
2001	3,64	-1,28
2002	4,50	0,86
2003	4,78	0,28
2004	5,03	0,25
2005	5,69	0,66
2006	5,50	-0,19
2007	6,35	0,85
2008	6,01	-0,34

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Perubahan (%)
2009	4,63	-1,38
2010	6,22	1,59
2011	6,17	-0,05
2012	6,03	-0,14
2013	5,56	-0,47
2014	5,01	-0,55
2015	4,88	-0,13
2016	5,03	0,15
2017	5,07	0,04
2018	5,17	0,10
2019	5,02	-0,15
2020	-2,07	-7,09
2021	3,69	5,76
2022	5,31	1,62
2023	5,05	-0,26
2024	5,03	-0,02
2025	5,11	0,08

Sumber: Data diolah peneliti (2026)

Perkembangan pertumbuhan ekonomi yang mengalami kenaikan selama periode penelitian menunjukkan perubahan yang bervariasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 1993 pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan sebesar 0,04%. Tahun 1994 kembali mengalami kenaikan sebesar 1,04%, dan pada tahun 1995 meningkat sebesar 0,68%. Setelah mengalami penurunan pada tahun 1996 hingga 1998, pertumbuhan ekonomi pada tahun 1999 mengalami kenaikan yang sangat signifikan sebesar 13,92%. Tahun 2000 kembali meningkat sebesar 4,13%. Tahun 2002 mengalami kenaikan sebesar 0,86%. Tahun 2003 kembali meningkat sebesar 0,28%, dan pada tahun 2004 meningkat sebesar 0,25%. Tahun 2005 mengalami kenaikan sebesar 0,66%. Tahun 2007 kembali mengalami kenaikan sebesar 0,85%. Tahun 2010 mengalami kenaikan sebesar 1,59%. Tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar

0,15%. Tahun 2017 kembali meningkat sebesar 0,04%, dan pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 0,10%. Setelah mengalami kontraksi ekonomi pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 5,76%. Tahun 2022 kembali meningkat sebesar 1,62%, dan pada tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 0,08%.

Berdasarkan Tabel IV.3, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga mengalami penurunan pada beberapa periode selama tahun penelitian. Pada tahun 1992 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan sebesar 0,49%. Tahun 1996 kembali mengalami penurunan sebesar 0,40%. Tahun 1997 mengalami penurunan sebesar 3,12%, dan pada tahun 1998 mengalami penurunan terbesar selama periode penelitian sebesar 17,83%. Tahun 2001 mengalami penurunan sebesar 1,28%. Tahun 2006 kembali mengalami penurunan sebesar 0,19%. Tahun 2008 mengalami penurunan sebesar 0,34%, dan pada tahun 2009 kembali mengalami penurunan sebesar 1,38%. Tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 0,05%. Tahun 2012 kembali mengalami penurunan sebesar 0,14%. Tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 0,47%, dan pada tahun 2014 kembali turun sebesar 0,55%. Tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 0,13%. Tahun 2019 kembali mengalami penurunan sebesar 0,15%. Tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup besar sebesar 7,09%. Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,26%, dan pada tahun 2024 kembali mengalami penurunan sebesar 0,02%.

C. Hasil Analisis Data

1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Hasil uji statistik deskriptif yang telah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel IV. 4 Uji Statistik Deskriptif

	<i>Tax ratio</i> (Y)	Belanja Pemerintah (X1)	Pertumbuhan Ekonomi (X2)
Mean	11.31400	16.06000	4.662286
Median	11.80000	15.80000	5.070000
Maximum	13.31000	19.50000	8.220000
Minimum	8.330000	14.20000	-13.13000
Std. Dev.	1.168174	1.437359	3.586866
Skewness	-0.621786	0.588642	-3.784832
Kurtosis	2.814504	2.201966	18.82212
Jarque-Bera	2.305449	2.949996	448.6407
Probability	0.315775	0.228779	0.000000
Sum	395.9900	562.1000	163.1800
Sum Sq. Dev.	46.39744	70.24400	437.4306

Sumber: Data diolah dengan Eviews 13 (2026)

Berdasarkan hasil statistik deskriptif pada Tabel IV. 4, jumlah observasi yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 35 data yang mencakup periode tahun 1991–2025. Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data penelitian yang meliputi nilai rata-rata (mean), nilai tengah (median), nilai maksimum, nilai minimum, standar deviasi, skewness, kurtosis.

a. *Tax ratio* (Y)

Variabel *tax ratio* memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 11,314, median sebesar 11,8, nilai maksimum sebesar 13,31, dan nilai minimum sebesar 8,33. Nilai rata-rata tersebut menunjukkan

bahwa selama periode penelitian *tax ratio* Indonesia berada pada kisaran 11,31% terhadap PDB.

Nilai standar deviasi sebesar 1,168 lebih kecil dibandingkan nilai rata-rata sebesar 11,314. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat penyebaran data relatif rendah sehingga data *tax ratio* cenderung terkonsentrasi di sekitar nilai rata-ratanya. Dengan demikian, fluktuasi *tax ratio* selama periode penelitian tergolong stabil dan tidak mengalami penyimpangan yang besar.

Nilai *skewness* sebesar -0,622 menunjukkan bahwa distribusi data cenderung miring ke kiri (*negatively skewed*), sedangkan nilai *kurtosis* sebesar 2,815 mendekati angka 3 yang menunjukkan bahwa distribusi data *tax ratio* relatif mendekati distribusi normal.

b. Belanja Pemerintah (X1)

Variabel belanja pemerintah memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 16,06, median sebesar 15,8, nilai maksimum sebesar 19,5, dan nilai minimum sebesar 14,2. Hal ini menunjukkan bahwa selama periode penelitian pemerintah Indonesia rata-rata mengalokasikan belanja sebesar 16,06% terhadap PDB.

Nilai standar deviasi sebesar 1,437 lebih kecil dibandingkan nilai rata-rata sebesar 16,06. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa data belanja pemerintah memiliki tingkat variasi yang rendah dan cenderung stabil selama periode penelitian. Artinya, perubahan

belanja pemerintah dari tahun ke tahun tidak mengalami fluktuasi yang terlalu besar.

Nilai *skewness* sebesar 0,589 menunjukkan distribusi data yang sedikit miring ke kanan (*positively skewed*), sedangkan nilai *kurtosis* sebesar 2,202 menunjukkan distribusi yang lebih datar dibandingkan distribusi normal.

c. Pertumbuhan Ekonomi (X2)

Variabel pertumbuhan ekonomi memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 4,662, median sebesar 5,07, nilai maksimum sebesar 8,22, dan nilai minimum sebesar -13,13. Nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi indonesia selama periode penelitian berada pada kisaran 4,66% per tahun.

Nilai standar deviasi sebesar 3,587 lebih kecil dibandingkan nilai rata-rata sebesar 4,662. Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran data masih berada dalam batas yang dapat diterima. Namun, dibandingkan dengan variabel *tax ratio* dan belanja pemerintah, nilai standar deviasi pertumbuhan ekonomi merupakan yang terbesar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki tingkat fluktuasi yang paling tinggi selama periode penelitian.

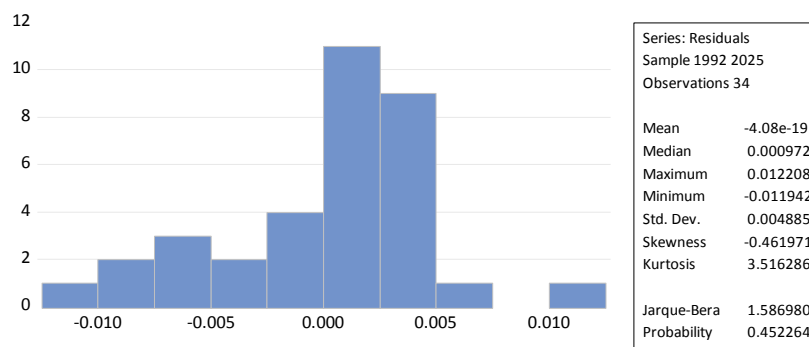
Nilai *skewness* sebesar -3,785 menunjukkan distribusi data yang sangat miring ke kiri. Sementara itu, nilai *kurtosis* sebesar 18,822 jauh di atas angka 3, yang mengindikasikan adanya nilai

ekstrem (*outlier*) yang cukup kuat dalam data. Kondisi ini dapat disebabkan oleh terjadinya krisis ekonomi dan pandemi yang menyebabkan kontraksi ekonomi yang cukup dalam pada beberapa periode pengamatan.

2. Hasil Uji Normalitas

Berikut ini disajikan hasil uji normalitas

Gambar IV. 1 Hasil Uji Normalitas



Sumber: Data diolah dengan Eviews 13 (2026)

Berdasarkan gambar IV. 1, hasil uji normalitas diperoleh nilai Probability sebesar 0,452264. $> 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa residual dalam model regresi terdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi klasik dalam model regresi telah terpenuhi sehingga model regresi layak digunakan untuk pengujian hipotesis.

3. Hasil Uji Multikolinieritas

Berikut ini disajikan hasil uji multikolinieritas pada penelitian ini:

Tabel IV. 5 Hasil Uji Multikolinieritas

Variance Inflation Factors

Date: 06/02/26 Time: 21:43

Sample: 1991 2025

Included observations: 35

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
X1	0.008371	1.242604	1.242362
X2	0.000497	1.242556	1.242362
C	0.007476	1.000629	NA

Sumber: Data diolah dengan Eviews 13 (2026)

Berdasarkan tabel IV. 5, diperoleh nilai centered VIF untuk variabel belanja pemerintah sebesar 1,242362 dan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,242362. Nilai tersebut berada di bawah batas maksimum VIF sebesar 10. Sehingga $1,242362 < 10$ maka tidak terjadi gejala multikolinieritas.

4. Hasil Uji Autokorelasi

Hasil Uji autokorelasi yang telah diolah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel IV. 6 Hasil Uji Autokorelasi

R-squared	0.323677	Mean dependent var	-0.070294
Adjusted R-squared	0.280044	S.D. dependent var	0.594008
S.E. of regression	0.504017	Akaike info criterion	1.551684
Sum squared resid	7.875032	Schwarz criterion	1.686363
Log likelihood	-23.37864	Hannan-Quinn	1.597614
F-statistic	7.418052	criter.	
Prob(F-statistic)	0.002330	Durbin-Watson stat	1.614931

Sumber: Data diolah dengan Eviews 13 (2026)

Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai Durbin-Watson (DW) sebesar 1,614931. Nilai $-2 < 1,614931 < 2$ berarti tidak terjadi gejala autokorelasi.

5. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Hasil Analisis regresi berganda yang telah diolah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel IV. 7 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.022605	0.091492	0.247075	0.8065
Belanja Pemerintah (X1)	0.079294	0.022288	3.557710	0.0012
Pertumbuhan Ekonomi (X2)	-0.065671	0.086465	-0.759500	0.4533

Sumber: Data diolah dengan Eviews 13 (2026)

Berdasarkan Tabel IV.7, nilai koefisien regresi pada tabel di atas, diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$TR = 0.022605 + 0.079294 BP - 0.065671 PE + e$$

- Berdasarkan hasil regresi, diperoleh nilai konstanta (C) sebesar 0,022605. Nilai konstanta ini menunjukkan bahwa apabila variabel Belanja Pemerintah (X1) dan Pertumbuhan Ekonomi (X2) diasumsikan tetap atau tidak mengalami perubahan, maka *Tax ratio* (Y) diperkirakan bernilai 0,022605.
- Koefisien regresi Belanja Pemerintah (X1) sebesar 0.079294 menunjukkan hubungan positif terhadap *Tax ratio*. Artinya, setiap kenaikan Belanja Pemerintah sebesar 1 persen akan meningkatkan

Tax ratio sebesar $0,079294 + 0,022605 = 0,101899$ dengan asumsi variabel lain dianggap konstan. Hubungan positif tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah berpotensi meningkatkan aktivitas ekonomi dan basis perpajakan sehingga dapat meningkatkan *tax ratio*.

- c. Koefisien regresi Pertumbuhan Ekonomi (X2) sebesar $-0,065671$ juga menunjukkan hubungan negatif terhadap *Tax ratio*. Artinya, setiap kenaikan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 1 persen akan menurun *Tax ratio* sebesar $-0,065671 + 0,022605 = -0,043066$ dengan asumsi variabel lain dianggap konstan. Hasil ini menunjukkan bahwa adanya hubungan yang berlawanan arah antara pertumbuhan ekonomi dan *tax ratio* dalam model penelitian.

6. Hasil Uji Hipotesis

a. Uji t (Parsial)

Hasil Uji t dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel IV. 8 Hasil Uji t (Uji Parsial)				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.022605	0.091492	0.247075	0.8065
Belanja Pemerintah (X1)	0.079294	0.022288	3.557710	0.0012
Pertumbuhan Ekonomi (X2)	-0.065671	0.086465	-0.759500	0.4533

Sumber: Data diolah dengan Eviews 13 (2026)

Nilai tabel pada taraf signifikan 5% dengan $dk = n - k = 35 - 3 = 32$ diperoleh 2,03. Berdasarkan Tabel IV.8, dapat disimpulkan bahwa hasil uji t (uji parsial) sebagai berikut:

- 1) Variabel belanja pemerintah memiliki nilai t-hitung (3,557710) > t-tabel (2,03), dengan nilai probabilitas sebesar $0,0012 < 0,05$ sehingga H_0 1 ditolak dan H_a 1 diterima. Hasil tersebut menunjukkan bahwa belanja pemerintah berpengaruh terhadap *tax ratio* indonesia.
- 2) Variabel pertumbuhan ekonomi memiliki nilai t-hitung(-0,75950) < t-tabel (2,03), dengan nilai probabilitas Sebesar $0,4533 > 0,05$ sehingga H_0 2 diterima dan H_a 2 ditolak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap *tax ratio* indonesia.

b. Uji F (Simultan)

Hasil Uji koefisien secara simultan yang telah diolah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel IV. 9 Hasil Uji F (Uji Simultan)

R-squared	0.323677	Mean dependent var	- 0.070294
Adjusted R-squared	0.280044	S.D. dependent var	0.594008
S.E. of regression	0.504017	Akaike info criterion	1.551684
Sum squared resid	7.875032	Schwarz criterion	1.686363
Log likelihood	-23.37864	Hannan-Quinn	1.597614
		criter.	
F-statistic	7.418052	Durbin-Watson stat	1.614931
Prob(F-statistic)	0.002330		

Sumber: Data diolah dengan Eviews 13 (2026)

Nilai F-tabel pada taraf signifikan 5% dengan df untuk pembilang (N_1) = $df_1 = k-1 = 3-1 = 2$ dan df untuk penyebut (N_2) = $df_2 = n-k-1 = 35-3 = 32$ diperoleh 3,29. Berdasarkan Tabel IV.9, dapat disimpulkan variabel belanja pemerintah dan pertumbuhan ekonomi

memiliki nilai f -hitung sebesar $7,418052 > f$ -tabel (3,29). Prob f -statistic sebesar $0,002330 < 0,05$ hasil tersebut H_0 ditolak sehingga belanja pemerintah dan pertumbuhan ekonomi secara simultan berpengaruh terhadap *tax ratio* di Indonesia.

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Hasil uji koefisien determinasi yang telah diolah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel IV. 10 Hasil Uji Koefisien Determinasi

R-squared	0.323677	Mean dependent var	-
			0.070294
Adjusted R-squared	0.280044	S.D. dependent var	0.594008
S.E. of regression	0.504017	Akaike info criterion	1.551684
Sum squared resid	7.875032	Schwarz criterion	1.686363
Log likelihood	-23.37864	Hannan-Quinn	1.597614
		criter.	
F-statistic	7.418052	Durbin-Watson stat	1.614931
Prob(F-statistic)	0.002330		

Sumber: Data diolah dengan Eviews 13 (2026)

Berdasarkan Tabel IV.8, diperoleh nilai Adjusted R-Squared sebesar 0,280044 atau 28%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Belanja Pemerintah (X1) dan Pertumbuhan Ekonomi (X2) mampu menjelaskan variasi *Tax ratio* (Y) sebesar 28%, sedangkan sisanya sebesar 72% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian. Dengan demikian, kemampuan model dalam menjelaskan perubahan *Tax ratio* tergolong cukup, meskipun masih terdapat faktor-faktor lain yang lebih dominan dalam memengaruhi *Tax ratio* di Indonesia.

D. Pembahasan

Pada bagian ini akan dibahas pengaruh Belanja Pemerintah (X1) dan Pertumbuhan Ekonomi (X2) terhadap *Tax ratio* (Y) di Indonesia periode 1991–2025 berdasarkan hasil uji parsial (uji t) dan uji simultan (uji F). Selain itu, hasil penelitian akan dikaitkan dengan teori yang digunakan serta dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antar variabel yang diteliti.

1. Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap *Tax Ratio* Indonesia

Belanja pemerintah merupakan instrumen fiskal yang digunakan untuk mendukung aktivitas ekonomi, pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan publik, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan belanja pemerintah dapat menciptakan efek berganda (*multiplier effect*) terhadap perekonomian melalui peningkatan konsumsi, investasi, dan produktivitas ekonomi.¹¹ Aktivitas ekonomi yang semakin meningkat akan memperluas basis pajak sehingga berpotensi meningkatkan penerimaan pajak negara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan belanja pemerintah yang efektif tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembiayaan pembangunan, tetapi juga dapat memperkuat kapasitas fiskal negara yang tercermin melalui peningkatan *tax ratio*.

¹¹ Mudrajad Kuncoro, *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, Dan Kebijakan* (Yogyakarta: Andi Offset, 2023). Hlm 34.

Hasil penelitian menunjukkan belanja pemerintah berpengaruh terhadap *tax ratio* di Indonesia. Temuan penelitian ini sesuai dengan teori fiskal Keynes yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah merupakan instrumen penting dalam mendorong aktivitas ekonomi melalui peningkatan permintaan agregat. Peningkatan aktivitas ekonomi akan menciptakan perluasan basis pajak yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan.¹² Perspektif *Maqashid Shariah* juga menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan publik melalui belanja pemerintah merupakan bagian dari tanggung jawab negara (*daulah*) dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat (*maslahah 'ammah*). Pengeluaran pemerintah yang diarahkan pada pembangunan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial akan menciptakan aktivitas ekonomi yang produktif sehingga mendukung peningkatan penerimaan negara secara berkelanjutan.

Hasil penelitian membuktikan bahwa belanja pemerintah merupakan faktor yang berpengaruh terhadap *tax ratio* Indonesia selama periode 1991–2025. Peningkatan pengeluaran pemerintah mampu menciptakan aktivitas ekonomi yang lebih luas sehingga memperkuat kapasitas penerimaan pajak negara. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan belanja pemerintah memiliki peran strategis dalam mendukung optimalisasi penerimaan perpajakan dan memperkuat kemandirian fiskal.

¹² N Gregory Mankiw, *Pengantar Ekonomi Makro (Edisi Indonesia)* (Jakarta: Salemba Empat, 2023). Hlm. 67.

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Andi Saputra dan Rahmat Hidayat, yang menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh dari belanja pemerintah terhadap *tax ratio* Indonesia.¹³ Hasil penelitian ini juga sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh DD Maryantika, yang menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari belanja pemerintah terhadap *tax ratio* Indonesia.¹⁴

Namun hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Chandra Wijaya dan Dimas Kusuma, yang menyimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari Belanja Pemerintah terhadap *Tax ratio* Indonesia.¹⁵ Hasil penelitian membuktikan bahwa belanja pemerintah merupakan faktor yang berpengaruh terhadap *tax ratio* Indonesia selama periode 1991–2025. Peningkatan pengeluaran pemerintah mampu menciptakan aktivitas ekonomi yang lebih luas sehingga memperkuat kapasitas penerimaan pajak negara. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan belanja pemerintah memiliki peran strategis dalam mendukung optimalisasi penerimaan perpajakan dan memperkuat kemandirian fiskal.

2. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap *Tax Ratio* Indonesia

¹³ Andi Saputra and Rahmat Hidayat, “Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Penerimaan Pajak Di Indonesia,” *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 13, no. 2, 2022, 89–102.

¹⁴ D D Maryantika and S Wijaya, “Determinants of Tax Revenue in Indonesia with Economic Growth as a Mediation Variable,” *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, Vol 8, no. 2, 2022, 450–65.

¹⁵ Citra Wijaya and Dian Kusuma, “The Negative Impact of Excessive Government Spending on Future Tax Revenue,” *Journal of Fiscal Studies* 5, no. 1, 2023, 45–58.

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa dalam suatu negara selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan meningkatnya aktivitas produksi, konsumsi, investasi, serta pendapatan masyarakat yang menjadi penggerak utama perekonomian. Peningkatan aktivitas ekonomi tersebut secara teoritis dapat memperluas basis perpajakan karena semakin banyak transaksi ekonomi, pendapatan, dan keuntungan usaha yang berpotensi menjadi objek pajak.¹⁶ Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga menggambarkan meningkatnya kemampuan masyarakat dan dunia usaha dalam menjalankan aktivitas ekonomi sehingga berpotensi meningkatkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap *tax ratio* Indonesia. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan maupun penurunan pertumbuhan ekonomi belum mampu memberikan perubahan yang berarti terhadap *tax ratio*. Kondisi tersebut terlihat dari beberapa periode ketika pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan, namun *tax ratio* tidak menunjukkan peningkatan yang searah. Fenomena ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum sepenuhnya mampu dikonversi menjadi peningkatan penerimaan pajak.

¹⁶ Jamzani Sodik, *Pengeluaran Pemerintah Dan Pertumbuhan Ekonomi* (Yogyakarta: UPN Press, 2021). Hlm. 32.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori *Tax Buoyancy* yang menyatakan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan penerimaan pajak secara otomatis melalui perluasan basis pajak tanpa memerlukan perubahan tarif pajak. Teori tersebut menjelaskan bahwa meningkatnya aktivitas ekonomi akan memperbesar pendapatan masyarakat dan keuntungan perusahaan sehingga potensi penerimaan pajak juga meningkat.¹⁷ Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan tersebut tidak terbukti pada periode penelitian. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan output ekonomi belum sepenuhnya mampu diikuti oleh peningkatan efektivitas pemungutan pajak. Tingginya sektor informal, rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, serta belum optimalnya administrasi perpajakan dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap *tax ratio*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi bukan merupakan faktor yang secara langsung menentukan perubahan *tax ratio* Indonesia selama periode penelitian. Peningkatan pertumbuhan ekonomi belum mampu mendorong peningkatan *tax ratio* secara signifikan karena masih terdapat berbagai faktor struktural yang memengaruhi kemampuan pemerintah dalam menghimpun penerimaan pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan *tax ratio* tidak hanya memerlukan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga

¹⁷ Hari Priyono, *Manajemen Perpajakan* (Malang: Madani, 2022). Hlm.12.

membutuhkan sistem perpajakan yang efektif, tingkat kepatuhan wajib pajak yang baik, serta kemampuan pemerintah dalam mengoptimalkan potensi pajak yang berasal dari aktivitas ekonomi. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap *tax ratio* Indonesia tidak dapat diterima.

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Andi Pratama, Salsabila Putri, dan Rizky Kurniawan, yang menyimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh dari Pertumbuhan Ekonomi terhadap *Tax ratio* Indonesia.¹⁸ Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rizka Rahmawati, yang menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari Pertumbuhan Ekonomi terhadap *Tax ratio* Indonesia.¹⁹ Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fina Silfiani, Andar Febriansyah, yang menyimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari pertumbuhan ekonomi terhadap *tax ratio* Indonesia.²⁰

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi bukan merupakan faktor yang secara langsung menentukan perubahan *tax ratio* Indonesia selama periode penelitian. Peningkatan pertumbuhan ekonomi belum mampu mendorong peningkatan *tax ratio* secara

¹⁸ Andi Pratama, Salsabila Putri, and Rizky Kurniawan, "Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Tax Ratio Pada Negara Berkembang," *Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Vol 24, no. 3 2022.

¹⁹ Rizka Rahmawati, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tax Ratio Di Negara Berkembang" (Universitas Indonesia, 2021).

²⁰ Fina Silfiani and Andar Febyansyah, "Effect of Inflation, Economic Growth, and Tax Rates on Tax Ratios in Asian Countries in the Period 2015-2020," *International Journal of Current Science Research and Review* Vol 5, no. 3, 2022, 781–94.

signifikan karena masih terdapat berbagai faktor struktural yang memengaruhi kemampuan pemerintah dalam menghimpun penerimaan pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan *tax ratio* tidak hanya memerlukan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga membutuhkan sistem perpajakan yang efektif, tingkat kepatuhan wajib pajak yang baik, serta kemampuan pemerintah dalam mengoptimalkan potensi pajak yang berasal dari aktivitas ekonomi. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap *tax ratio* Indonesia tidak dapat diterima.

3. Pengaruh Belanja Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Secara Simultan Terhadap *Tax Ratio*

Tax ratio merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan negara dalam menghimpun penerimaan pajak.²¹ Indikator ini sering digunakan untuk menilai efektivitas sistem perpajakan, kapasitas fiskal negara, serta tingkat optimalisasi penerimaan pajak dalam mendukung pembiayaan pembangunan. Semakin tinggi *tax ratio*, semakin besar kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan penerimaan pajak dari aktivitas ekonomi yang berlangsung. Perkembangan *tax ratio* dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya belanja pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Belanja pemerintah dapat mendorong aktivitas ekonomi melalui peningkatan pengeluaran publik,

²¹ Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan: Konsep, Sistem, Dan Implementasi* (Bandung: Rekayasa Sains, 2023). Hlm. 41.

sedangkan pertumbuhan ekonomi mencerminkan peningkatan aktivitas produksi dan pendapatan yang berpotensi memperluas basis perpajakan.

Hasil uji simultan menunjukkan bahwa belanja pemerintah dan pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap *tax ratio* Indonesia. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori fiskal Keynes yang menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah melalui pengeluaran negara dan aktivitas ekonomi memiliki peran penting dalam memengaruhi kondisi perekonomian dan kapasitas fiskal negara.²² Teori keuangan publik juga menjelaskan bahwa penerimaan pajak dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah mengelola pengeluaran serta kemampuan perekonomian menciptakan aktivitas ekonomi yang dapat menjadi sumber penerimaan negara. Perspektif *Maqashid Shariah* memandang bahwa pengelolaan keuangan negara harus diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat melalui distribusi sumber daya yang efektif dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pengeluaran pemerintah yang produktif serta aktivitas ekonomi yang berkembang akan memperkuat kemampuan negara dalam menghimpun penerimaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan publik dan menjaga kesejahteraan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja pemerintah dan pertumbuhan ekonomi secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax ratio* Indonesia. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa

²² N Gregory Mankiw, *Pengantar Ekonomi Makro (Edisi Indonesia)* (Jakarta: Salemba Empat, 2023). Hlm. 67

peningkatan kapasitas fiskal negara tidak hanya bergantung pada optimalisasi belanja pemerintah maupun pertumbuhan ekonomi secara terpisah, tetapi dipengaruhi oleh keterkaitan kedua variabel tersebut dalam mendorong aktivitas ekonomi dan penerimaan negara. Kemampuan pemerintah dalam mengelola pengeluaran publik secara efektif serta menciptakan kondisi ekonomi yang kondusif menjadi faktor penting dalam meningkatkan *tax ratio*.

E. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam prosesnya. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel yang digunakan masih terbatas, yaitu hanya Belanja Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel independen dalam menjelaskan perubahan *Tax ratio* di Indonesia. Sementara itu, *tax ratio* dipengaruhi oleh berbagai faktor lain seperti lainnnya seperti tingkat kepatuhan wajib pajak, inflasi, investasi, struktur ekonomi, ukuran sektor informal, efektivitas administrasi perpajakan, serta kebijakan perpajakan yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.
2. Periode penelitian menggunakan data tahunan selama tahun 1991–2025, sehingga jumlah observasi yang digunakan relatif terbatas. Penggunaan data tahunan menyebabkan beberapa permasalahan ekonomi jangka pendek yang terjadi dalam periode tertentu belum dapat ditangkap secara

lebih rinci dibandingkan apabila menggunakan data triwulanan atau bulanan.

3. Penelitian hanya berfokus pada Indonesia, sehingga hasil penelitian belum tentu dapat digeneralisasikan pada negara lain yang memiliki karakteristik ekonomi, sistem perpajakan, dan kebijakan fiskal yang berbeda.
4. Model penelitian menggunakan pendekatan regresi linear berganda, sehingga hubungan yang dianalisis bersifat linear. Padahal dalam praktiknya hubungan antara kebijakan fiskal, pertumbuhan ekonomi, dan *tax ratio* dapat bersifat lebih kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal seperti krisis ekonomi, perubahan regulasi perpajakan, maupun kondisi global.

Keterbatasan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian dengan menambahkan variabel lain yang relevan, memperluas periode pengamatan, menggunakan metode analisis yang lebih komprehensif, serta membandingkan kondisi Indonesia dengan negara lain sehingga diperoleh hasil penelitian yang lebih mendalam dan luas.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh Belanja Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap *Tax ratio* di Indonesia periode 1991–2025, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Belanja pemerintah berpengaruh terhadap *tax ratio* di Indonesia. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan atau penurunan belanja pemerintah mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perubahan *tax ratio*. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah selalu diikuti oleh peningkatan penerimaan pajak secara proporsional karena masih dipengaruhi oleh faktor lain seperti efektivitas belanja, struktur ekonomi, dan administrasi perpajakan.
2. Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap *tax ratio* di Indonesia. Hasil tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi selama periode penelitian belum mampu meningkatkan *tax ratio* secara signifikan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum sepenuhnya dapat dikonversi menjadi peningkatan penerimaan pajak.
3. Belanja pemerintah dan pertumbuhan ekonomi secara simultan berpengaruh terhadap *tax ratio* di Indonesia. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kedua variabel secara bersama-sama mampu memengaruhi perubahan *tax ratio*. Dengan demikian, peningkatan *tax ratio* tidak hanya

dipengaruhi oleh satu faktor, melainkan merupakan hasil interaksi antara kebijakan fiskal pemerintah dan perkembangan aktivitas ekonomi nasional.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan faktor yang lebih dominan dalam memengaruhi *tax ratio* dibandingkan belanja pemerintah. Oleh karena itu, upaya peningkatan *tax ratio* di Indonesia perlu didukung oleh kebijakan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta diikuti dengan pengelolaan fiskal yang efektif untuk memperluas basis perpajakan dan meningkatkan penerimaan negara.

B. Implikasi

Peningkatan *tax ratio* tidak dapat hanya mengandalkan kebijakan pengeluaran pemerintah semata. Pemerintah perlu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan karena pertumbuhan ekonomi terbukti menjadi faktor yang lebih efektif dalam meningkatkan kemampuan negara menghimpun penerimaan pajak. Hasil penelitian ini juga mengindikasikan bahwa efektivitas belanja pemerintah perlu menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan fiskal. Belanja pemerintah sebaiknya diarahkan pada sektor-sektor yang mampu menciptakan aktivitas ekonomi produktif sehingga dapat memperluas basis perpajakan dan meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka panjang. Dengan demikian, fokus kebijakan tidak hanya pada besarnya anggaran yang dikeluarkan, tetapi juga pada kualitas dan produktivitas penggunaan anggaran tersebut.

Selain itu, penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa peningkatan *tax ratio* memerlukan sinergi antara kebijakan fiskal dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengintegrasikan kebijakan pengelolaan belanja negara dengan strategi pembangunan ekonomi agar tujuan peningkatan penerimaan pajak dapat dicapai secara lebih optimal dan berkelanjutan.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan yang telah diuraikan, maka beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Saran Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu ekonomi publik, ekonomi pembangunan, dan ekonomi Islam, khususnya yang berkaitan dengan hubungan antara belanja pemerintah, pertumbuhan ekonomi, dan *tax ratio*. Penelitian ini menunjukkan bahwa belanja pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax ratio*, sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Temuan tersebut dapat menjadi bahan pengembangan teori mengenai kapasitas fiskal negara, efektivitas kebijakan fiskal, serta implementasi teori Keynesian dan *Tax Buoyancy* dalam konteks negara berkembang. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain seperti kepatuhan wajib pajak, investasi, inflasi, struktur ekonomi, dan kualitas administrasi perpajakan agar diperoleh model yang

lebih komprehensif dalam menjelaskan perubahan *tax ratio*. Bagi Otoritas Perpajakan

2. Saran Empiris

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi empiris bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi *tax ratio*. Temuan penelitian menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti oleh peningkatan *tax ratio*, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan hubungan tersebut tidak signifikan. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan periode penelitian yang lebih panjang, cakupan negara yang lebih luas, atau metode analisis yang berbeda seperti *Vector Error Correction Model* (VECM), *Autoregressive Distributed Lag* (ARDL), maupun data panel agar diperoleh hasil yang lebih mendalam mengenai hubungan antara variabel fiskal dan *tax ratio*. Bagi Peneliti Selanjutnya

3. Saran Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan fiskal yang bertujuan meningkatkan *tax ratio* Indonesia. Pengelolaan belanja pemerintah perlu diarahkan pada sektor-sektor produktif yang mampu menciptakan aktivitas ekonomi dan memperluas basis perpajakan. Upaya peningkatan *tax ratio* tidak hanya dilakukan melalui peningkatan penerimaan pajak, tetapi juga melalui peningkatan kualitas belanja negara agar memberikan

dampak ekonomi yang lebih besar. Perbaikan administrasi perpajakan, perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta penguatan pengawasan perpajakan juga perlu terus dilakukan agar pertumbuhan ekonomi yang terjadi dapat dikonversi menjadi peningkatan penerimaan pajak secara optimal dan berkelanjutan..

Dengan adanya penelitian lanjutan dan perbaikan kebijakan yang berkelanjutan, diharapkan upaya peningkatan *tax ratio* di Indonesia dapat dilakukan secara lebih efektif guna mendukung kemandirian fiskal dan pembangunan ekonomi nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, A., & Ghuzini, D. (2024). Leading Indicators of Tax Revenue: Does Government Spending Matter? *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 9(2), 84–96.
- Amri, K. (2023). Does Tax Effort Moderate the Effect of Government Expenditure on Regional Economic Growth? A Dynamic Panel Data Evidence from Indonesia. *Ekonomika*, 102(2), 6–27. <https://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/Ekonomika>
- Ariefianto, M. D. (2022). *Ekonometrika Esensial: Teori dan Aplikasi dengan EViews*. Erlangga.
- Arsyad, L. (2023). *Ekonomi Pembangunan*. UPP STIM YKPN.
- Bank, W. (2024). *World Development Indicators*.
- Bank, W., Indonesia, K. K. R., OECD, & News, D. (2024). *Tax ratio 2025 Hanya Sebesar 9,31% Dari PDB*.
- Bank, W., OECD, Fund, I. M., Bird, R., & Indonesia, K. K. R. (2024). *World Development Indicators*. OECD Publishing.
- Barro, R. J. (1990). Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth. *Journal of Political Economy*, 98(5), 103-TY-RPRT AU-Badan Kebijakan Fiskal PY-202. <https://doi.org/10.1086/261726>
- Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2022). *Analisis Ekonometrika untuk Ekonomi dan Bisnis: Implementasi EViews*. Rajawali Pers.
- Bird, R. M., & Zolt, E. M. (2015). Redistribution via Taxation: The Limited Role of the Personal Income Tax in Developing Countries. *World Development*, 66, 625–639. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2014.09.008>
- Bird, R., OECD, Musgrave, R. A., Fund, I. M., & Mankiw, N. G. (2023). *Tax Buoyancy and Tax Elasticity*. McGraw-Hill.
- Dewi, R. S. (2022). Analisis Kemandirian Fiskal Dan Utang Luar Negeri Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(2), 110–125.
- Dias, T., Iglesias, J. R., & Gonçalves, S. (2025). The Inequity of Consumption-Based Tax Systems. *Economic Modelling*, 134(1).
- Fauzia, A., & Ryandono, M. N. H. (2022). *Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid Syariah*. Rajawali Pers.
- Fiskal, B. K. (2024). *Kerangka Ekonomi Makro Dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2025*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Fund, I. M., Keynes, J. M., Mankiw, N. G., & OECD. (2023). *The General*

Theory of Employment, Interest and Money. Macmillan.

Gujarati, D. N., Porter, D. C., & Greene, W. H. (2018). *Basic Econometrics* (5th ed.). Pearson Education.

Gujarati, D. N., Porter, D. C., Greene, W. H., Ghozali, I., & Sugiyono. (2018a). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan SPSS* (5th ed.). Pearson Education.

Gujarati, D. N., Porter, D. C., Greene, W. H., Ghozali, I., & Sugiyono. (2018b). *Basic Econometrics* (8th ed.). Pearson Education.

Hafidhuddin, D. (2024). *Manajemen Fiskal Syariah: Zakat dan Pajak dalam Pembangunan*. IPB Press.

Hafidz, A.-. (2023). Long-Term Effect of Taxation as a Fiscal Policy Instrument for National Economic Recovery. *Waridin Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 6(2).

Hamka. (1982). *Tafsir Al-Azhar*. Pustaka Panjimas. <https://opac.perpusnas.go.id>

Hidayat, A. (2021). *Analisis Data Time Series dengan EViews: Teori dan Praktik*. Alfabeta.

Huda, N., Anggraini, D., & Idris, A. (2023). *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islami*. Rajawali Pers.

Iba, Z., & Wardhana, A. (2023). *Populasi dan Sampel*. CV. Eureka Media Aksara.

Indrawati, S. M. (2024). Indonesia's Fiscal Policy in the Aftermath of the Pandemic. *Journal of Indonesian Fiscal Economy*, 6(1).

Ismaya, S. (2021). *Pengantar Ekonomi Makro*. Pustaka Baru Press.

Jhingan, M. L. (2016). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. RajaGrafindo Persada.

Keweloh, S., Klein, M., & Prüser, J. (2023). Estimating Fiscal Multipliers by Combining Statistical Identification with Potentially Endogenous Proxies. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 210(3).

Kuncoro, M. (2023). *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Andi Offset.

Machali, I. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Mahmudi. (2022). *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. STIM YKPN.

Mankiw, N. G. (2021a). *Macroeconomics*. Worth Publishers.

Mankiw, N. G. (2021b). *Principles Of Economics*. CENGAGE.

Mankiw, N. G. (2023). *Pengantar Ekonomi Makro (Edisi Indonesia)*. Salemba

Empat.

- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan Indonesia*. Andi.
- Marthon, S. S. (2021). *Ekonomi Islam: Antara Teori dan Praktik*. Kencana.
- Maryantika, D. D. (2022). Determinants of Tax Revenue in Indonesia with Economic Growth and Government Spending. *JPPi*, 8(2), 450–465.
- Maryantika, D. D., & Wijaya, S. (2022). Determinants of Tax Revenue in Indonesia with Economic Growth as a Mediation Variable. *JPPi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8(2), 450–465.
- Mubarak, Z. (2023). *Kebijakan Pajak dalam Perspektif Maqashid Syariah*. Andi Offset.
- Mulyani, S. (2021). *Kebijakan Fiskal Indonesia: Menghadapi Krisis Global*. Gramedia Pustaka Utama.
- Mustafa, E. U. (2022). *Maqashid Syariah dalam Kebijakan Publik*. Remaja Rosdakarya.
- Nanga, M. (2023). *Pengantar Ekonomi Makro*. RajaGrafindo Persada.
- Nasional, B. P. P. (2020). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024*. Bappenas.
- Pajak, D. J. (2020). *Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024*. Direktorat Jenderal Pajak. [https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2020-11/Buku Renstra DJP 2020-2024.pdf](https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2020-11/Buku_Renstra_DJP_2020-2024.pdf)
- Pasaribu, B. S., Herawati, A., Utomo, K. W., & Aji, R. H. S. (2022). *Metodoogi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Media Edu Pustaka.
- Pohan, C. A. (2021). *Optimasi Pajak: Strategi dan Implementasi*. Gramedia Pustaka Utama.
- Pratama, A., Putri, S., & Kurniawan, R. (2022). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan *Tax ratio* pada Negara Berkembang. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia*, 24(3).
- Pratama, D., Susanti, L., & Hartono, B. (2022). Informal Sector and the Failure of Tax Collection in Developing Countries. *International Journal of Development Issues*, 10(2), 156–170.
- Priyono, H. (2022). *Manajemen Perpajakan*. Madani.
- Qutb, S. (2003). *Fi Zhilalil Qur'an*. Darusy Syuruq. <https://archive.org>
- Rahayu, S. K. (2023). *Perpajakan: Konsep, Sistem, dan Implementasi*. Rekayasa Sains.

- Rahmawati, E. (2021). Economic Growth and Tax Revenue: Evidence from Indonesia. *Asian Journal of Economics*, 7(4), 112–125.
- Rahmawati, R. (2021). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tax ratio Di Negara Berkembang*. Universitas Indonesia.
- Resmi, S. (2022). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Salemba Empat.
- Romer, D. (2012). Advanced Macroeconomics and Growth. *Journal of Economic Perspectives*, 26(2), 3–24. <https://doi.org/10.1257/jep.26.2.3>
- Saefullah, A. (2024). *Statistik Untuk Penelitian*. STIE Ganesha.
- Sahir, S. H. (2022). *Metodologi Penelitian*. KBM Indonesia.
- Santoso, H. R., & Sholeh, M. (2025). *Ekonomi Pembangunan: Membangun Indonesia yang Mandiri dan Berdaya Saing*. Tahta Media Group.
- Saputra, A., & Hidayat, R. (2022). Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Penerimaan Pajak di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 13(2), 89–102.
- Saragih, J. P. (2022). *Desentralisasi Fiskal di Indonesia*. Percetakan Galang.
- Sari, N. (2023). *Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi*. Deepublish.
- Septiani, A. S. (2023). Effect of Per capita Income, Economic Growth Rate and Tax Rate on Tax ratios in ASEAN Countries Period 2015-2021. *OIKOS: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi*, 8(1), 122–135.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati. <https://opac.perpusnas.go.id>
- Siddharta, P. (2025). Memahami Hubungan Antara Tax Buoyancy Dan Tax ratio di Indonesia. *IKPI (Ikatan Konsultan Pajak Indonesia)*.
- Silfiani, F.-J., AU - Saputra, A., AU - Hidayat, R., 2022, P.-, Indonesia, T.-P. B. P. terhadap P. P. di, Publik, J.-J. E. dan K., 13, V.-, 2, I.-, 89, S.-, 102, E.-, Jakarta, C.-, RI, P.-B. K. D., <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/ekp>, U.-, -a, E., & Febyansyah, A. (2022). Effect of Inflation, Economic Growth, and Tax Rates on Tax ratios in Asian Countries in the Period 2015-2020. *International Journal of Current Science Research and Review*, 5(3), 781–794. <https://doi.org/10.47191/ijcsrr/V5-i3-23>
- Siregar, B. G., & Hardana, H. A. (2022). *Metode Penelitian EKonomi dan Bisnis*. Merdeka Kreasi Group.
- Situmorang, D. (2023). Analysis of Central Government Financial Performance: Tax ratio and Government Spending in Indonesia (2015-2022). *MEGA: Hope Economic Journal*, 1(1), 60–64.
- Smith, J. D. (2023). *Global Taxation Challenges in the Post-Pandemic Era*.

Academic Press.

- Sodik, J. (2021). *Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi*. UPN Press.
- Statistik, B. P. (2024). *Statistik Konsumsi Rumah Tangga Indonesia (Susenas)*. Badan Pusat Statistik.
- Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta Bandung.
- Sukirno, S. (2022). *Makroekonomi: Teori Pengantar*. Rajawali Pers.
- Tambunan, T. T. H. (2022). *Perekonomian Indonesia*. Ghalia Indonesia.
- Wahyudi, S. T. (2022). *Konsep dan Aplikasi Ekonometrika Menggunakan EViews*. Salemba Empat.
- Waluyo. (2022). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.
- Wibowo, A. E. (2021). *Metodologi Penelitian*. Insania.
- Widarjono, A. (2023). *Ekonometrika: Pengantar dan Aplikasinya disertai Panduan EViews*. UPP STIM YKPN.
- Wijaya, C., & Kusuma, D. (2023a). Belanja Pemerintah dan Stabilitas Fiskal di Indonesia. *Jurnal Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 7(1), 45–58. <https://doi.org/10.33105/jknkp.v7i1>
- Wijaya, C., & Kusuma, D. (2023b). The negative impact of excessive government spending on future tax revenue. *Journal of Fiscal Studies*, 5(1), 45–58.
- Yossinomita, H., Haryadi, N., Nainggolan, S., & Zulfanetti. (2024). Maximizing Economic Growth in Indonesia: A Model-Based Exploration of Optimal Tax ratios. *Indonesian Treasury Review*, 9(2), 87–98.
- Zuhaili, W. az-. (2013). *Tafsir Al-Munir*. Gema Insani. <https://opac.perpusnas.go.id>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PRIBADI

Nama : Nurhanipah
Nim : 22 402 00143
Tempat/ Tanggal Lahir : Lobu Sipange, 12 Februari 2003
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Anak Ke : 5 Dari 7 Bersaudara
Alamat : Sipange Siunjam, Kecamatan Sayurmatinggi
Kewarganegaraan : Indonesia

B. IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Santi Aji Aritonang
Pekerjaan : Petani
Nama Ibu : Hotna Sari Hasibuan
Pekerjaan : Petani
Agama : Islam
Alamat : Sipange Siunjam, kec. sayurmatinggi
Kewarganegaraan : Indonesia

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SD Negeri No. 101106 Siunjam (2010–2016)
SMP : SMP N 3 Batang Angkola (2016 - 2019)
SMA : SMK N 1 Batang Angkola (2019 - 2022)
S 1 : UIN SYAHADA Padangsidempuan.

Moto Hidup : "Jalani Hari Ini Lebih Baik Dari Kemarin"

LAMPIRAN

Tahun	PDB Nominal (Triliun Rp)	Penerimaan Pajak (Triliun Rp)	Belanja Negara (Triliun Rp)	PDB Riil (Indeks Volume)	Y (<i>Tax ratio</i> = Pajak/PDB Nom)	X1 (Rasio Belanja = Belanja/PDB Nom)	X2 (Pertumbuhan = % Perubahan PDB Riil)
1991	227,0	26,6	34,1	1.069,5	11,70%	15,00%	6,95%
1992	260,0	30,7	39,5	1.138,6	11,80%	15,20%	6,46%
1993	329,0	38,8	48,7	1.212,6	11,80%	14,80%	6,50%
1994	382,0	45,5	55,4	1.304,0	11,90%	14,50%	7,54%
1995	454,0	54,0	64,5	1.411,2	11,90%	14,20%	8,22%
1996	532,0	63,8	77,1	1.521,6	12,00%	14,50%	7,82%
1997	627,0	74,0	95,9	1.593,1	11,80%	15,30%	4,70%
1998	955,0	100,3	167,1	1.383,9	10,50%	17,50%	-13,13%
1999	1.099,0	118,7	195,6	1.394,9	10,80%	17,80%	0,79%
2000	1.389,0	152,8	229,2	1.463,5	11,00%	16,50%	4,92%
2001	1.646,0	181,1	321,0	1.516,7	11,00%	19,50%	3,64%
2002	1.822,0	209,5	328,0	1.585,0	11,50%	18,00%	4,50%
2003	2.013,0	237,5	352,3	1.660,8	11,80%	17,50%	4,78%
2004	2.295,0	280,0	390,2	1.744,3	12,20%	17,00%	5,03%
2005	2.774,0	346,8	504,9	1.843,6	12,50%	18,20%	5,69%
2006	3.339,0	427,4	601,0	1.944,9	12,80%	18,00%	5,50%
2007	3.950,0	517,5	703,1	2.068,5	13,10%	17,80%	6,35%
2008	4.948,0	658,6	915,4	2.192,8	13,31%	18,50%	6,01%
2009	5.606,0	667,1	936,2	2.294,3	11,90%	16,70%	4,63%
2010	6.864,0	830,5	995,3	2.437,0	12,10%	14,50%	6,22%
2011	7.287,0	896,3	1.107,6	2.587,4	12,30%	15,20%	6,17%
2012	8.267,0	1.030,9	1.322,7	2.743,4	12,47%	16,00%	6,03%

Tahun	PDB Nominal (Triliun Rp)	Penerimaan Pajak (Triliun Rp)	Belanja Negara (Triliun Rp)	PDB Riil (Indeks Volume)	Y (<i>Tax ratio</i> = Pajak/PDB Nom)	X1 (Rasio Belanja = Belanja/PDB Nom)	X2 (Pertumbuhan = % Perubahan PDB Riil)
2013	9.546,0	1.164,6	1.546,5	2.895,9	12,20%	16,20%	5,56%
2014	10.565,0	1.246,7	1.669,3	3.041,0	11,80%	15,80%	5,01%
2015	11.531,0	1.337,6	1.798,8	3.189,4	11,60%	15,60%	4,88%
2016	12.406,0	1.339,8	1.860,9	3.349,8	10,80%	15,00%	5,03%
2017	13.588,0	1.343,9	2.011,0	3.519,7	9,89%	14,80%	5,07%
2018	14.838,0	1.519,4	2.210,9	3.701,6	10,24%	14,90%	5,17%
2019	15.833,0	1.545,3	2.311,6	3.887,4	9,76%	14,60%	5,02%
2020	15.434,0	1.285,7	2.592,9	3.807,0	8,33%	16,80%	-2,07%
2021	16.970,0	1.546,0	2.783,1	3.947,4	9,11%	16,40%	3,69%
2022	19.588,0	2.033,2	3.094,9	4.157,1	10,38%	15,80%	5,31%
2023	20.892,0	2.154,0	3.112,9	4.367,0	10,31%	14,90%	5,05%
2024	22.400,0	2.257,9	3.270,4	4.586,6	10,08%	14,60%	5,03%
2025	24.000,0	2.234,4	3.480,0	4.821,0	9,31%	14,50%	5,11%